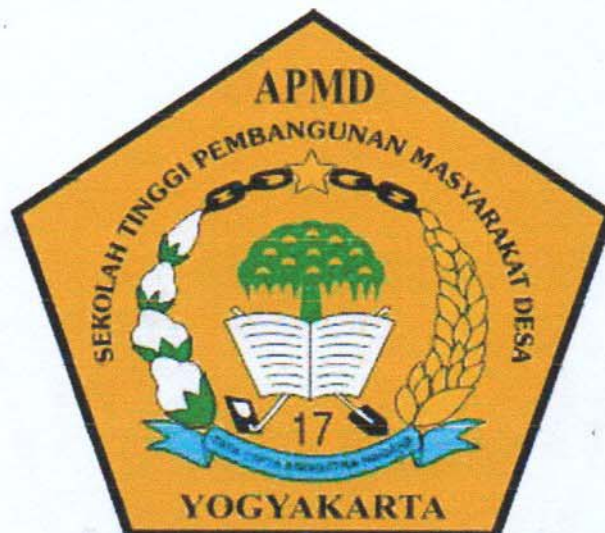


SKRIPSI

**SINERGI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT  
DALAM INOVASI PEMBANGUNAN DESA WISATA  
(Studi Penelitian Kualitatif di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi,  
Kabupaten Sleman, DIY)**



Disusun oleh:

**TAUFIK HIDAYAH IDRIS**  
17520188

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**HALAMAN JUDUL**

**SINERGI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM  
INOVASI PEMBANGUNAN DESA WISATA**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun oleh:



**TAUFIK HIDAYAH IDRIS**  
**17520188**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

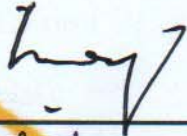

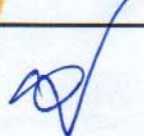
Hari : Rabu

Tanggal : 5 Juli 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<b><u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u></b> Ketua Penguji/Pembimbing	
<b><u>Drs. Suharyanto, M.M</u></b> Penguji Samping I	
<b><u>Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si</u></b> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Hidayah Idris

NIM : 17520188

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata, adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua-sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Penulis



Taufik Hidayah Idris  
17520188

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ungkapan syukur dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Nurdin Idris Boling dan Mama Sunarti Narang. Kepada saudara saya, kakak Umar, kakak Maya, kakak Inang, kaka Say, kaka Dayat, adik Sita dan adik Umi. Kepada ponakan paman yang ganteng dan cantik yang belum sempat tertulis dalam lembar ini, kepada paman, bibi serta saudara sepupu yang belum saya sebutkan satu per satu. Terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, dukungan, kasih sayang dan kesabaran kalian sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana ini dengan baik.
2. Teman-teman pengurus dalam organisasi Badan Legislatif Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta (BLM) periode 2017-2018, DPK GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta periode 2018-2019 dan periode 2019-2020 yang memberikan ruang untuk belajar membentuk cara berpikir dan mendukung saya dalam mensukseskan setiap program kerja yang kita rencanakan.
3. Teman-teman seperjuangan DPK GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta, rumah tempat saya belajar. Kepada para bung yang banggakan, Bung Rinus (Pak Kom), Bung Sandi (Pak Sek), Bung Tomy, Bung Theo, Bung Chobas, Bung Toby, Bung Ino Mofu, Bung Ary Radja, Bung Bili, Bung Ikar, Bung Ijay, Bung Jef, Bung Vino, Bung Aslam, Bung Aldin, Bung Syahbana, Bung Viktor Watem, Bung Oci, Bung Verlin, Bung Je, Bung Muis, Bung Adio, Bung Langga, Bung Haris, Bung Ama, Bung Rudi, Bung Bima, Bung Julham, Bung James, Bung Arif, Markus, Bung Joze, Bung Jekson, Bung Joe, Bung Hendra

dan para sarinah yang saya cintai, Sarinah Diana, Sarinah Mumun, Sarinah Ari, Sarinah Resa, Sarinah Wanti, Sarinah Nersi, Sarinah Reny, Sarinah Nursyamsiah, Sarinah Susan, Sarinah Angel, Sarinah Ita, Sarinah Rika, Sarinah Tika, Sarinah Lala, Sarinah Lisa, Sarinah Maya, Sarinah Litansia, Sarinah Aulia, Sarinah Lea, Sarinah Marlis, Sarinah Widia, serta Bung dan Sarinah calon kader yang belum sempat saya tuliskan namanya, tetap semangat dalam berproses di GMNI. Merdeka, Gmni Jaya, Marhaen Menang.

4. Teman-teman Kos Griyahahan, Ubbu Vengky, Guru Apong, Wili, Mario Bei, Rio, Finus, Hery, Elfrit dan Oncis, salam sehat untuk kalian semua dimanapun kalian berada.
5. Teman-teman tongkrongan pencari pundi-pundi rupiah Kanda Fadil, Juan, Piter, Bimbom, Pak Ci dan teman-teman Ilmu Pemerintahan 2017 dimanapun kalian berada, salam sehat selalu untuk kita semua.
6. Terimakasih kepada orang-orang yang pernah mencintai saya.

Sekali lagi terimakasih atas doa, nasihat, serta pengalaman yang diberikan dan sangat berarti selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai perjalanan hidup kita yang dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

## ***MOTTO***

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(H.R. Muslim)

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Beramal harus pakai ilmu. Berilmu harus diamalkan”

(Quotes)

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang”

(Soekarno)

“Bacalah buku, mungkin kau mampu mengunyah, mencerna dan menikmati sampai kau lupa bahwa kau sedang kelaparan. Membaca adalah satu-satunya alasan bertahan hidup karena buku adalah roh manusia”

(Taufik Hidayah Idris)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat yang diberikan sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata”** dapat terselesaikan dengan baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, serta gagasan yang mendukung selesainya skripsi ini dengan baik.



5. Bapak Drs. Suharyanto, M.M sebagai Penguji Samping I dan Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si sebagai Penguji Samping II. Terimakasih atas saran dan masukannya selama menguji serta membimbing saya sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Mohamad Firdaus, S.IP., M.A. selaku Asisten Dosen yang dalam proses penulisan proposal dan senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung selesainya skripsi ini dengan baik.
7. Bapak, Ibu Dosen dan semua civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada saya selama menuntut ilmu di kampus ini.
8. Pemerintah Kalurahan Wonokerto, Masyarakat Pulesari, dan Pengelola Desa Wisata Pulesari sebagai tempat penelitian skripsi yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tua saya, kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan serta nasihat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang solutif guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023  
Penulis

Taufik Hidayah Idris  
17520188

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka ( <i>Literature Review</i> ).....	11
E. Kerangka Konseptual .....	20
1. <i>Governance</i> .....	20
2. Pemerintah Desa .....	23
3. Masyarakat.....	26
4. Desa Wisata .....	30
5. Pembangunan Desa Wisata .....	32
6. Sinergi.....	34
7. Inovasi .....	37
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	39
G. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Unit Analisis .....	41
3. Metode Pengumpulan Data .....	42
4. Metode Analisis Data .....	45

## BAB II. PROFIL KALURAHAN WONOKERTO DAN PROFIL DESA

WISATA PULESARI.....	47
A. Profil Kalurahan Wonokerto .....	47
1. Sejarah Kalurahan Wonokerto.....	47
2. Kondisi Geografis Kalurahan Wonokerto .....	47
a. Batas Administrasi .....	47
b. Kondisi Fisik Wilayah .....	49
c. Kondisi Topografi.....	50
3. Kondisi Demografi Kalurahan Wonokerto.....	50
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	50
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	51
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	52
d. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	53
4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Wonokerto .....	54
a. Kondisi Sosial .....	54
b. Kondisi Ekonomi .....	55
c. Kondisi Budaya.....	56
5. Sarana dan Prasarana Kalurahan Wonokerto .....	58
a. Fasilitas Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto .....	59
b. Fasilitas Pendidikan .....	60
c. Fasilitas Kesehatan.....	61
d. Fasilitas Peribadatan .....	62
e. Fasilitas Perekonomian .....	62
f. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.....	63
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Wonokerto .....	64
B. Profil Desa Wisata Pulesari .....	67
1. Sejarah Desa Wisata Pulesari .....	67
2. Letak Administratif, Demografi dan Geografi .....	69
3. Logo dan Arti Desa Wisata .....	70
4. Struktur Lembaga/Organisasi .....	72
5. Visi dan Misi .....	73
6. Potensi Desa Wisata .....	73

7. Proses Berwisata.....	79
BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	81
A. Jaringan ( <i>networking</i> ) Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata .....	81
B. Keberagaman Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Maupun Implementasi Pembangunan Desa Wisata .....	91
C. Hubungan Horizontal dan Vertikal Antara Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata.....	96
D. Akseptabel ( <i>acceptable</i> ) Antara Pemerintah dan Masyarakat Terkait Dengan Penerimaan Pembangunan Desa Wisata.....	106
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Data Informan Kalurahan Wonokerto .....	42
Tabel II.1. Pembagian Wilayah Padukuhan, RW dan RT Kalurahan Wonokerto.....	48
Tabel II.2. Penggunaan Lahan Kalurahan Wonokerto.....	49
Tabel II.3. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel II.4. Data Penduduk Tingkat Pendidikan .....	52
Tabel II.5. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	53
Tabel II.6. Data Penduduk Menurut Agama .....	54
Tabel II.7. Organisasi Kemasyarakatan .....	55
Tabel II.8. Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto .....	59
Tabel II.9. Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidikan .....	60
Tabel II.10. Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan .....	61
Tabel II.11. Jumlah Sebaran Fasilitas Peribadatan .....	62
Tabel II.12. Jumlah Sebaran Fasilitas Perekonomian .....	63
Tabel II.13. Jumlah Sebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum...	64
Tabel II.14. Data Keanggotaan Pemerintahan Kalurahan Wonokerto.....	65
Tabel II.15. Daftar Nama Anggota BPD Kalurahan Wonokerto .....	66
Tabel II.16. Penggunaan Lahan Dusun Pulesari .....	70
Tabel II.17. Susunan Pengurus Desa Wisata Pulesari.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo Desa Wisata Pulesari.....	70
Gambar II. 2 Gua Sejarah.....	73
Gambar II.3 <i>Tracking</i> Sungai.....	73
Gambar II.4 Wisata Kebun Salak.....	75
Gambar II.5 Perikanan .....	75
Gambar II.6 Seni dan Budaya .....	76
Gambar II.7 Kerajinan .....	77
Gambar II.8 Kuliner .....	77
Gambar II.9 <i>Homestay</i> .....	78
Gambar II.10 Paket Wisata 1 Hari .....	79
Gambar II.11 Paket Makrab 2D 1 N .....	80

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan desa wisata saat ini sedang menjadi sebuah gejala sosial baru yang mengubah tatanan sosial di Desa. Desa-Desa yang mempunyai potensi wisata kemudian disulap menjadi desa wisata. Motif ekonomi menjadi faktor utama hadirnya berbagai macam desa wisata. Desa Wisata Pulesari merupakan salah satu dari delapan desa wisata yang berada di Kalurahan Wonokerto. Pembangunan Desa Wisata Pulesari merupakan swadaya masyarakat dan uniknya Pembangunan Desa Wisata Pulesari tidak melibatkan Pemerintah Kalurahan yang notabene sebagai institusi Pemerintahan di Desa. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan fokus meneliti tentang bagaimana relasi kuasa Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Kerangka *Collaboration Governance* Untuk Mencapai Sinergi Dalam Pembangunan Desa Wisata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif yaitu membuat sebuah deskripsi atas sebuah fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat guna menjawab pertanyaan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat dan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Desa Wisata Pulesari merupakan prakarsa masyarakat dengan menggunakan konsep pembangunan berbasis masyarakat. bisa dilihat bahwa sampai saat ini partisipasi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam, adat istiadat serta budaya dalam balutan desa wisata sangat berhasil, ditambah dengan mengelaborasi antara desa wisata dengan pertanian salak. Pengelolaan yang secara mandiri ini membuat masyarakat sudah cukup mampu dan tidak melibatkan Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari, bahkan dari pihak luar juga tidak terlibat. Namun pengelolaan yang secara mandiri tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga membutuhkan sinergi dari Pemerintah untuk berinovasi dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari. Terdapat tiga faktor dalam sinergi yaitu kepercayaan, komunikasi dan kreatifitas untuk mengembangkan desa wisata. Faktor penghambat dalam sinergi ini adalah persepsi yang belum sama antara masyarakat dan Pemerintah Kalurahan mengenai sinergi pembangunan desa wisata, komunikasi yang masih kurang dan pengetahuan regulasi yang kurang dirasakan oleh masyarakat. Faktor pendukungnya adalah terjalinnya sinergitas antara setiap stakeholder dalam pengembangan desa wisata dan keterbukaan dari setiap masing-masing stakeholder serta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, komunikasi yang baik, dan tidak adanya kepentingan pribadi. Hal ini bisa sangat mendukung jalannya pengelolaan Desa Wisata Pulesari yang dapat saling menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat Pulesari.

**Kata kunci: Sinergi, Inovasi dan Pembangunan Desa Wisata**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wonokerto adalah salah satu Kalurahan yang mempunyai potensi alam, budaya dan sejarah yang hingga saat ini masih dijaga dengan baik. Potensi-potensi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pembangunan desa wisata dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain menjadi tujuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan desa wisata ditujukan kepada masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia yang bukan lagi menjadi objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan suatu potensi yang mampu dimanfaatkan secara bersama antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Hal yang menjadi pendukung dalam pembangunan desa wisata adalah adanya upaya dari Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa yang belum dikelola dengan baik.

Potensi wisata yang berada di Kalurahan Wonokerto ini menjadi penggerak ekonomi wisata dan juga mendorong inovasi masyarakat yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat. Adanya destinasi wisata di Kalurahan Wonokerto bisa membawa perubahan untuk Kalurahan Wonokerto. Diketahui, Kalurahan Wonokerto mempunyai tujuh destinasi wisata yang setiap destinasi



wisata tersebut diantaranya menyajikan wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya dan juga wisata kuliner. Desa Wisata Pulesari memiliki karakteristik yang membuat desa wisata ini menarik banyak pengunjung hingga saat ini karena menyajikan nuansa wisata alam dan budaya yang saat ini masih dilestarikan.

Desa Wisata Pulesari terletak di sisi selatan lereng gunung Merapi, Desa Wisata Pulesari berada di Dusun Becici Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Becici merupakan salah satu Dusun yang agak modern dari segi fasilitasnya namun memegang adat tradisi, seni dan budaya seperti gotong royong, Kenduri, kesenian dan religius (seni budaya, seni kubro siswo, hadroh). Komoditas utama dari dusun Becici adalah salak pondoh dan produk olahan seperti jenang salak, keripik salak, sirup salak, kopi kentos. Uraian tersebut merupakan inovasi dari masyarakat yang bekerja sama dalam membangun Wisata Pulesari. Hal ini diperlukan agar dapat bersaing dengan wisata lain yang saat ini pertumbuhannya sedang digalakkan oleh Pemerintah.

Menurut Nurcahyono (2017:44) mengatakan bahwa fenomena Desa Wisata yang menghiasi dunia pariwisata pedesaan di Yogyakarta selama dua dekade terakhir ini secara konseptual Desa Wisata masih menjadi sebuah krisis dana perdebatan dikalangan para akademisi, tetapi hadirnya Desa Wisata mampu menjadi sebuah gejala sosial baru yang mengubah tatanan sosial yang ada di pedesaan. Dimana desa-desa yang memiliki potensi wisata kemudian disulap menjadi Desa Wisata oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten Sleman, yang tujuan utama adanya mensejahterakan masyarakat lokal khususnya dalam hal ekonomi. Motif ekonomilah kemudian menghasilkan proses perubahan

sosial dan budaya yang juga tidak jarang menghasilkan masalah sosial baru, bahkan fiksi dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan kajian serius dan mendalam mengenai proses dinamika kebudayaan yang terjadi dalam terbentuknya komunitas.

Latar belakang terbentuknya Desa Wisata Pulesari sudah ada sejak lama karena sudah memiliki sebuah potensi berkaitan dengan kebudayaan yang sangat kental. Kebudayaan tersebut sudah sangat kental dengan masyarakat sehingga hal itu menjadi dasar gotong royong dalam membangun Desa Wisata Pulesari. Dampak yang terjadi pada erupsi gunung Merapi tahun 2010 mengakibatkan sumber pendapatan masyarakat menurun jauh karena sebelum adanya Desa Wisata Pulesari mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani salak. Salak menjadi komoditi utama mengalami kerusakan akibat dampak dari erupsi gunung Merapi sehingga proses untuk perawatan salak dan penyulaman kembali salak yang mati membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Dengan proses penyulaman salak yang sangat Panjang maka timbullah inisiasi untuk menciptakan Pulesari menjadi kawasan pariwisata. Dengan adanya erupsi gunung Merapi yang berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga membuat masyarakat Pulesari berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka Pulesari dijadikan sebagai Kawasan pariwisata dengan sistem usaha bersama yang berbasis masyarakat. Dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari terdapat pengurus Desa Wisata yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan juga beberapa kelompok lain yang juga terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari.

Menurut Uphoff dalam (Putra, 2013:228), terbentuknya institusi lokal memiliki beberapa bentuk yang menawarkan pendampingan dalam

pengembangan Desa Wisata yaitu diantaranya administrasi lokal (bank lokal), pemerintah lokal, organisasi atau komunitas setempat, koperasi dan bisnis swasta. Khusus dalam dunia pariwisata, organisasi atau komunitas itu hadir dalam wujud Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis merupakan kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan dalam meningkatkan pengembangan kegiatan pariwisata di daerahnya dan mendukung kesuksesan pembangunan pariwisata nasional. Pokdarwis akan berperan sebagai perantara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif untuk pengembangan destinasi pariwisata, serta untuk membangun peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah sekitarnya yang memiliki potensi pariwisata. Iklim atau lingkungan kondusif dikaitkan dengan perwujudan Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang dikembangkan secara konsisten di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata. Wisata Pulesari mempunyai pengurus Desa Wisata yaitu Kelompok Sadar Wisata Dewi Pule. Pokdarwis Dewi Pule merupakan komunitas yang pertama kali mencetuskan Desa Wisata Pulesari, namun dalam perjalanannya pembangunan desa wisata tidak langsung disetujui oleh masyarakat karena pengetahuan masyarakat mengenai desa wisata sangat kurang dan memerlukan literasi kepada masyarakat secara terus menerus sehingga Pokdarwis Dewi Pule memberikan literasi kepada masyarakat sebagai hal dasar untuk kelancaran pembangunan desa wisata.

Dalam dunia pariwisata institusi lokal hadir dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kehadiran Pokdarwis sebagai institusi lokal dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan atau manajerial, karena pada

dasarnya Pokdarwis memiliki kewenangan untuk mengatur setiap aktivitas pembangunan dan pengembangan pariwisata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengikutinya. Pokdarwis merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting untuk membentuk kesadaran masyarakat akan pembangunan pariwisata di daerahnya.

Sejauh ini pengelolaan Desa Wisata Pulesari dikelola langsung oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bernama Dewi Pule. Keterlibatan masyarakat adalah sebagai pelaku usaha yang bekerja sama dengan Pokdarwis Dewi Pule. Maka sebagai pelaku usaha masyarakat berperan sebagai investor yang mendanai pembangunan Desa Wisata Pulesari dan hasilnya akan dibagi dengan Pokdarwis Dewi Pule. Sedangkan keterlibatan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Wisata adalah mendukung melalui infrastruktur seperti prasarana desa. Pemerintah Desa harus bersinergi dalam membangun dan mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemerintah adalah proses politik, hukum dan administrasi (Sutoro Eko, 2021:7), maksudnya kapasitas pemerintah desa dalam proses politik adalah kehendak yang dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat dan hukum sebagai instrumen untuk melaksanakan persetujuan politik sedangkan administrasi sebagai pelengkap dalam memberikan legitimasi. Lebih lanjut Sutoro Eko (2021:15) mengatakan bahwa governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *government making*. Governabilitas bersifat interaktif sehingga dibutuhkan *governance*. Desa mempunyai otoritas dalam mengurus dan mengatur wilayahnya dengan menggunakan kapasitas sebaik mungkin agar tidak keliru dalam mengelola sumber daya yang Desa miliki.

Seharusnya dalam pembangunan dan pengelolaan desa wisata, harusnya ada sinergi antara Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara individu maupun komunitas (Pokdarwis). Dalam sinergi pemerintah desa mempunyai peran sebagai pendamping, fasilitator, monitoring dan evaluasi, sedangkan Pokdarwis berperan sebagai pengelola utama wisata yang dipercaya oleh Pemerintah Desa.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini hendak mengungkap sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata Pulesari yang berada di Kalurahan Wonokerto. Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai subyek atau pelaku dalam pembangunan Desa Wisata. Sehingga akan diteliti lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan konsep *Governance* yaitu relasi antara pemerintah (Pemerintah Kalurahan Wonokerto) dan masyarakat dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata. Pembangunan desa wisata ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa saja, tetapi ada aktor lain yang berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata tersebut, yaitu masyarakat yang terbentuk dalam suatu komunitas (Pokdarwis). Relasi merupakan manajemen strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Komunitas Lokal (Pokdarwis) tersebut agar pembangunan desa wisata berjalan efektif. Pemerintah Desa memahami bahwa pembangunan desa merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Sedangkan Komunitas Lokal (Pokdarwis) memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa.

Pendapat diatas dapat dijelaskan menurut Puspitasari C. et al (2022) dalam (Suharyanto, et al., 2014) mengatakan bahwa relasi antara Pemerintah Desa dengan pengurus BUMDesa diperlukan tata kelola yang baik dan memerlukan

prinsip-prinsip, sebagai berikut : *pertama*, kooperatif, yakni mampu melakukan kerjasama dan bekerjasama dalam keberlangsungan hidup maupun untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. *Kedua*, partisipatif, yakni dukungan dan kontribusi penuh dari semua pihak yang terlibat didalamnya. *Ketiga*, emansipatif, yakni perlakuan sama tanpa ada bias baik dari segi agama, golongan, ataupun suku untuk seluruh stakeholders' yang terlibat. *Keempat*, transparan, yakni masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses berbagai pengetahuan mengenai aktivitas yang dilakukan terutama yang memiliki pengaruh pada kepentingan umum. *Kelima*, akuntabel, yakni pertanggungjawaban dari seluruh aktivitas dan kegiatan unit usahanya. *Keenam*, *sustainable*, yakni BUMDesa harus dapat menjadi wadah bagi pengembangan maupun pelestarian berbagai kegiatan usaha.

Sebagaimana kita ketahui bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa angin segar bagi perubahan Desa. Bagaimana tidak, Desa yang dulunya dijadikan obyek pembangunan oleh negara, namun setelah lahirnya Undang-Undang Desa maka kedudukan Desa bukan lagi menjadi obyek pembangunan melainkan sebagai subyek pembangunan dan menjadi topik hangat yang dibicarakan mulai dari masyarakat, akademisi hingga kalangan politisi. Undang-Undang tersebut mengandung 13 (tiga belas) asas, dua asas diantaranya yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi adalah pengakuan negara terhadap hak Desa untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa. Sedangkan subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan

masyarakat desa, termasuk menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 18 ditegaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat. Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya membuka peluang bagi semakin berkembangnya kedaulatan Desa, tetapi juga memicu optimalisasi pertumbuhan legitimasi otoritas Desa sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Desa, Desa dideskripsikan sebagai kombinasi antara *self-governing community* dan juga *local-self government*. Dalam perspektif ini Desa berada di posisi yang seimbang di mana Desa mempunyai kewenangan berbasis asal usul dan berskala lokal yang harus diakui oleh negara dan negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melibatkan Desa dalam setiap kebijakan baik level pusat, provinsi dan kabupaten. Implikasi subyek/pelaku pembangunan di mana masyarakat desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan proses pembangunan di Desa dan mengatur berbagai macam kepentingan yang bersifat lokal. (Hendrikus Paulus Kaunang, 159:2019).

Oleh karena itu, pembangunan objek wisata dan potensi desa wisata untuk menjadi desa wisata sangat membutuhkan peran Pemerintah Desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Pembangunan desa wisata tentunya harus dilihat dari

kearifan lokal masyarakat desa seperti gotong royong, pola-pola swadaya, dan institusi sosial yang dapat mendukung pembangunan desa wisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yang beragam. Destinasi wisata tersebut terlihat dari wisata alam, wisata budaya, wisata pesisir, wisata bahari, wisata spiritual dan wisata kuliner. Selain disebut sebagai kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai daya tarik sendiri pada bidang sektor pariwisata karena menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata bisa menjadi sektor pemasukan Daerah maupun negara yang mampu mendukung perekonomian masyarakat dan biaya-biaya pembangunan.

Keberlangsungan suatu pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun membutuhkan sinergi dengan *stakeholder* lainnya. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa wisata menjadi komitmen dari semua pihak, tidak terkecuali masyarakat desa sebagai aktor utamanya. Untuk itu keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata menjadi hal yang penting karena dari masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami akan potensi wilayahnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa hal yang akan diperoleh selaras dengan kebutuhan dan keuntungan setempat.

Sesuai dengan Soebagyo dalam (Hadiwijoyo, 2012:68) yang menyatakan penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan dan hasil dari kegiatan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung, peran aktif masyarakat sangat menentukan dalam kelangsungan kegiatan pariwisata. Berdasarkan pernyataan tersebut maka partisipasi aktif masyarakat sangat



diperlukan dalam pengembangan desa wisata dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat secara langsung dapat diwujudkan melalui desa wisata. Pengembangan desa wisata bukan hanya sebagai atraksi bagi wisatawan tetapi memiliki fungsi yaitu untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

Indonesia sebagai negara berkembang sedang gencar mengembangkan pariwisata pedesaan dengan membentuk desa wisata. Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya ekonomi desa. Karena itu, tiap Daerah dan Desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan perspektif *Governance*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sinergi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam inovasi pembangunan desa wisata?”

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, manfaat dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang sinergi pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam inovasi pembangunan desa wisata.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam melakukan inovasi pembangunan desa wisata.

### **D. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukur Suleman dan Christina Kahutama (2020) dalam *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom* volume 2 nomor 1 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata (Studi Pada Desa Gamtala, Kabupaten Halmahera Barat)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hal utama yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah dalam proses pengembangan desa

wisata dilakukan dengan penyaluran informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam bentuk rapat dan sosialisasi mengenai pelaksanaan program pemerintah desa untuk pengembangan pariwisata. Namun realitanya Pemerintah Desa Gamtala dalam pelaksanaan pembangunan objek wisata tidak maksimal sebagaimana diharapkan dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program pemerintah tentang pembangunan Desa Gamtala sebagai desa wisata sehingga hampir semua masyarakat Desa Gamtala menolak karena kurangnya komunikasi, koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah desa dalam membangun desa wisata.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cintantya Andhita Dara Kirana dan Rike Anggun Artisa (2020) dalam Jurnal Administrasi Publik volume 6 nomor 1 dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu model yang digunakan untuk membangun suatu daerah sehingga pemerintah tidak mandiri dalam mengelola daerahnya namun bekerja sama dalam membangun daerah bersama pemangku kepentingan yang lain. Maka aktor-aktor yang terlibat dalam peran pembangunan pariwisata ini adalah pemerintah yang mempunyai peran sebagai sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan. kemudian dari masyarakat mempunyai peran yang dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam hal menyuarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui pembentukan komunitas. Peran dari sektor swasta adalah membantu

pemerintah untuk memberikan stimulus berupa inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pihak swasta seperti merumuskan suatu inovasi dalam hal pembangunan. Peran dari pihak media adalah bagaimana media dapat menjadi alat untuk mendukung pihak pemerintah dalam hal sosialisasi dan promosi sehingga eksistensi dari pemerintah dalam menjalankan programnya dapat tersosialisasi dengan baik sehingga informasi akan program yang telah dirumuskan pemerintah dapat secara optimal sampai kepada masyarakat sekitar.

3. Penelitian berikutnya dari Hary Hermawan (2016) dalam Jurnal Pariwisata volume 3 nomor 2 dengan Judul “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata Nglanggeran dimulai dengan kesiapan masyarakat dari tingkat pendidikan, pengetahuan serta tingkat keterlibatan dalam pengembangan desa wisata. Selain itu pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana juga dipersiapkan oleh pemerintah sehingga hal tersebut akan menjadi peluang dalam menarik wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Nglanggeran. Dampak dari pariwisata di desa wisata Nglanggeran berdampak positif terhadap pendapatan dari penghasilan sampingan masyarakat yang meningkat pada berbagai bidang mata pencaharian selain dari pertanian dan dengan adanya desa wisata ini dapat mengurangi pengangguran masyarakat Nglanggeran.
4. Selanjutnya penelitian pada tahun (2017) yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Andriyani dalam Jurnal Ketahanan Nasional dengan judul

artikel “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak terlepas dari adanya wilayah pedesaan yang memiliki potensi alam dan budaya serta wilayah desa masih memiliki lingkungan fisik yang belum tercemar. Adat istiadat yang khas dan masih terjaga menjadi daya tarik bagi wisatawan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata lokal adalah bentuk dari pemberdayaan masyarakat. keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat, penyuluhan mengenai pemanfaatan potensi desa dan mendukung pembangunan sarana prasarana desa.

5. Penelitian dari Ika Rizkiyah Khomzi, Setiyo Handono dan Anis Trianawati (2019) dalam *Journal Agribusiness* volume 13 nomor 2 dengan judul artikel “Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul tidak terlepas dari berbagai stakeholder sebagai pendukungnya. Stakeholder tersebut diantaranya yaitu pemerintah Desa Pujon Kidul, BNI Brawijaya sebagai pihak swasta, BUMDes Sumber Sejahtera dan pengelola Cafe Sawah sebagai masyarakat. Partisipasi dari masyarakat luas yang dianggap masih kurang menyebabkan terhambatnya kegiatan pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul khususnya Cafe Sawah. Hal tersebut diketahui berdasarkan 3 indikator penentuan tingkat sinergi yaitu

kepercayaan, komunikasi, dan kreativitas. Faktor pendukung dalam sinergitas stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata ini adalah keterbukaan dari masing-masing stakeholder, hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, komunikasi yang baik, dan tidak adanya kepentingan pribadi. Sedangkan faktor penghambat sinergitas stakeholder dalam pengembangan Cafe Sawah di Desa Pujon Kidul, yaitu persepsi yang masih belum sama di masyarakat mengenai pengembangan Cafe Sawah, komunikasi dengan BNI Brawijaya yang masih kurang, pengetahuan regulasi pemerintah yang kurang dirasakan oleh pengelola Cafe Sawah.

6. Penelitian dari Moch Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf (2022) dalam Jurnal Publika volume 10 nomor 2 dengan judul artikel "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)". Hasil dari penelitian ini dilihat dari peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, serta fasilitas- fasilitasnya. Namun masih terdapat kendala yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jurung yaitu adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya : kurangnya partisipasi masyarakat, limbah kotoran yang mencemari aliran sungai, alokasi dana, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa Jurung. Pemerintah Desa cenderung hanya membuat program tanpa

melakukan sosialisasi secara maksimal terkait program tersebut kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih tidak peduli terhadap program desa wisata yang dijalankan.

7. Penelitian dari Herdiana Dian (2019) dalam Jurnal JUMPA volume 6 nomor 1 tentang “Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat”. Dengan menggunakan metode studi pustaka, maka hasil dari penelitian ini mengarah pada peran masyarakat dalam membangun desa wisata yang dimana masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan desa wajib dilibatkan dalam proses pengembangan desa wisata secara menyeluruh. Selain itu, peran pemerintah juga menjadi salah satu faktor dalam membangun desa wisata tanpa terkecuali masyarakat tetap dilibatkan karena sebagai sasaran utama dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian masyarakat memiliki kepemilikan sejarah. Artinya masyarakat lebih mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki desa dibanding pihak luar sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai kontribusi dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan. Kemudian jika ada kerja sama dengan pemilik modal (swasta) maka pemilik modal harus mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat dan mampu mendorong akselerasi pengembangan desa wisata. Maka dengan sinergi tersebut pengembangan pariwisata akan berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama serta memberikan keuntungan kepada para pihak yang terlibat didalamnya.

8. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Ayu Suryasih (2018) dalam Jurnal Destinasi Pariwisata volume 5 nomor 2 dengan judul artikel “Sinergi Pengelolaan Wilayah Desa Wisata Serang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur”. Penelitian ini menghasilkan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan berbagai pembinaan dan memotivasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Desa wisata pantai Serang berada pada lahan pemerintah yang dalam hal ini dikelola oleh Perum Perhutani dan sinergi dalam pengelolaan wilayah Desa Wisata Serang diidentifikasi berdasarkan pada beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tahap perencanaan awal dilakukan oleh ketiga pihak dengan dibuatnya MOU (*Memorandum of Understanding*) tentang pengembangan potensi desa wisata. Selanjutnya pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak desa yaitu dengan membentuk suatu kelembagaan berupa Kelompok Sadar Wisata “Segoro” Desa Serang. Pada tahap pengarahan, masyarakat lokal berperan dalam pengembangan daya tarik wisata, pengadaan *homestay*, serta penambahan fasilitas pendukung. Dinas Pariwisata berperan dalam mempromosikan Desa Wisata Serang serta daya tarik yang dimiliki melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Blitar. Sedangkan Perum Perhutani bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap kawasan hutan yang berada di Desa Wisata Serang. Fungsi terakhir dari adalah pengendalian. Pada proses pengendalian ini, ketiga pihak yang meliputi masyarakat lokal, Perum Perhutani dan Dinas



Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata khususnya bidang pariwisata melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Eka Trisnawati, Hari Wahyono dan Cipto Wardoyo (2018) dalam Jurnal Pendidikan volume 3 nomor 1 dengan judul artikel “Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Desa Galengdowo merupakan Desa yang berada di dataran tinggi lebih tepatnya di lereng gunung Arjuno yang mempunyai alam dan budaya yang ditopang dengan kekayaan adat serta budaya kultural dan bersinergi dengan kearifan lokal petani buah dan sayur yang merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat. Proses terbentuknya desa wisata ini dilihat dari ciri khas masyarakat yang sudah ada sejak lama sehingga untuk membangun objek wisata sangat diperlukan partisipasi masyarakat dan ditopang dengan adanya infrastruktur yang memadai. Namun untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah melekat akan menghilangkan karakteristik pertanian dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan stimulus tanpa menghilangkan kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Maka dari itu Agropolitan yang merupakan unsur kedua dari pariwisata adalah jawabannya, dengan adanya agropolitan dimana didalamnya mencakup tentang pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan pertanian baik dari sisi pembenihan, penanaman, perawatan dan penjualan.

10. Penelitian dari Wawan Setiyo Tjahjono, Eko Murdiyanto, Budi Widayanto (2021) dalam Jurnal Dinamika Sosial EKonomi volume 22

nomor 1 dengan judul artikel “Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Di Kawasan Hutan Lindung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk sinergi pemerintah dan masyarakat dalam kerjasama pemanfaatan hutan lindung yang dilakukan Pengelola Wisata Bukit Pengger. Pengelolaan wisata Hutan Lindung Bukit Pengger dilaksanakan dengan bentuk kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY dalam hal ini Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lindung melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan mekanisme kerjasama dengan organisasi masyarakat Pengelola Wisata Bukit Pengger merupakan salah satu pengelola wisata dari Koperasi Noto Wono yang secara administrasi berkedudukan di Dusun Sendangsari, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Proses pelaksanaan kerja sama dalam mengelola hutan lindung ini dimulai dengan tahapan koordinasi untuk berbagi peran dengan masyarakat dengan dibuatkan perjanjian kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dengan masyarakat di dalam pengelolaan hutan telah terlaksana melalui bentuk kerjasama pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pengelolaan Wisata Bukit Pengger. Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dijadikan suatu solusi pemecahan kendala permasalahan pengelolaan hutan oleh daerah lain untuk mencapai tujuan utama pelestarian manfaat fungsi hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil *literature review* di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan desa wisata dalam kerangka *governance* telah menggunakan beberapa keterlibatan *stakeholder* baik itu masyarakat, Pemerintah Desa atau dari Pokdarwis. Tetapi yang perlu dipahami bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, penelitian ini akan mencoba mengkerangkai arena *governance* dalam hubungan antara pemerintah desa dengan Pokdarwis. Oleh karena itu, penelitian ini akan berbeda dengan melihat peran pemerintah desa yang kurang memiliki intervensi cukup dalam pembangunan desa wisata di Pulesari.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka memperoleh pemahaman dan kerangka pemikiran terkait dengan sinergi pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam inovasi pembangunan desa wisata di Kalurahan Wonokerto tepatnya di Desa Wisata Pulesari, maka diperlukan beberapa konsep dan teori yang menjadikan dasar dan referensi terhadap arah penelitian. Beberapa konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis penelitian ini sebagaimana diperlihatkan dibawah ini.

##### **1. Governance**

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenalkan dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak *Woodrow Wilson* memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Istilah Pemerintahan atau dalam bahasa Inggris

*governance* yaitu *the act, fact, manner of governing*, berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian *governance* adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993;45) bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dengan berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Deddy Mulyadi, 2015:129-133).

Pandangan di atas menjelaskan bahwa hadirnya konsep *governance* sebagai pengelolaan organisasi pelebagaan dalam serangkaian kegiatan mempunyai tujuan tertentu. Kemudian Dwiyanto Agus (2015:1), menjelaskan bahwa konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau Lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (Lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek teori maupun kajian pemerintahan. Dengan demikian gagasan lahirnya konsep *governance* bertujuan untuk menyegarkan struktur pemerintah yang selama ini hanya menyelenggarakan pemerintah yang kaku dalam melaksanakan sistem pemerintahan.

Kemudian Sitepu, Putri (2020:9) mengatakan bahwa *governance* tidak sama dengan *government* (pemerintah), dalam arti sempit *governance* adalah sebagai lembaga, tetapi *governance* dalam arti yang luas adalah proses pemerintahan (Dwipayana dkk, 2003:8). Dalam konteks *government* lebih diartikan sebagai “mereka” sedangkan *governance* lebih diartikan sebagai “kita”, dalam hal ini konteks *government* dilihat seolah-olah hanya pemerintah atau politisi yang dapat mengatur, melaksanakan sesuatu, dan memberikan sebuah pelayanan, akan tetapi jika dilihat dari konteks *governance* atau “kita” memberikan penjelasan bahwasanya terdapat peleburan antara yang “memerintah” dan yang “diperintah” karena *governance* ini melibatkan semuanya dalam berbagai proses *Governance*. Menurut bevir dalam Zaenuri (2016: 20) menjelaskan bahwa *Governance* adalah bentuk transformasi sistem tata kelola pemerintah yang meliputi beberapa aspek yang dimulai dari perubahan sistem hirarki dan jaringan pasar kemitraan, interkoneksi administrasi dengan masyarakat sipil, perubahan aktivitas pemerintah dari negosiasi dan diplomasi, serta keterlibatan lembaga non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pembuatan pemerintah (*government making*) merupakan gagasan dan teori yang dikedepankan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Sebagai tubuh pengetahuan, *government making* itu, didekati dan dibentuk dengan lima konsep besar: *government*, *governing*, *governability*, *governance* dan *governmentality* (Sutoro Eko:2021). *Governance* adalah salah satu dari kelima (5G) lainnya yang menjadi tubuh pengetahuan dari *Government Making*. *Governance*

merupakan konseptualisasi yang lebih menekankan pada interaksi atau relasi antar aktor ketimbang proses atau tata cara pemerintahan dari setiap aspek yang menarik untuk dikaji. *Governance* yang oleh Sutoro Eko (2021) diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang intinya adalah interaksi antara pemerintah dengan yang lain dalam menjalankan fungsi *governing* (mengatur dan mengurus). Lebih lanjut Sutoro Eko (2021) menyatakan bahwa Pemerintah tanpa *governance*, atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran namun sebaliknya ”*governance without government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar.

Puspitasari C. et al., (2022) dalam H. George Frederickson (1997) mengatakan bahwa *governance* dapat diinterpretasikan dalam 4 terminologi, yakni *pertama*, *networking* dan desentralisasi. *Kedua*, keberagaman aktor dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. *Ketiga*, berhubungan dengan jaringan aktor dari lintas organisasi baik secara horizontal maupun vertikal. *Keempat*, *governance* dipandang sebagai sesuatu yang bisa diterima (*acceptable*), lebih absah, kreatif, responsif. Dapat dikatakan bahwa *governance* berhubungan dengan *networking* antara aktor di dalam organisasi maupun lintas organisasi baik secara horizontal maupun vertikal dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, serta dianggap lebih absah, kreatif, responsif (Sukardi, 2014).

## **2. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa secara garis besar merupakan pemerintahan yang berlangsung di desa dan dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa dibantu oleh

perangkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merupakan organisasi pemerintahan yang mempunyai peran besar dalam menjalankan tugasnya. Kemudian UU No. 6/2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas : a) kepastian hukum; b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; c) tertib kepentingan umum; d) keterbukaan; e) proporsionalitas; f) profesionalitas; g) akuntabilitas; h) efektivitas dan efisiensi; i) kearifan lokal ; j) keberagaman; dan k) partisipatif.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat serta memenuhi kebutuhan rakyat karena bersifat hakikat. Negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah (Sugiman, 2018:82).

Menurut Sutoro Eko (2015: 46) menerangkan bahwa, Desa merupakan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti Desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawa

dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah” bukan berarti Desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau Kepala Desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU No. 32/2004. “bawah” juga berarti bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Istilah “bawah” juga mempunyai kesamaan dengan istilah “depan” dan “dekat”. Istilah “depan” berarti bahwa Desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sedangkan istilah “dekat” berarti bahwa secara administratif dan geografis, Pemerintah Desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial, “dekat” berarti bahwa Desa menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat.

Konsep pemerintahan diatas menegaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai kelompok orang yang bekerja didalam suatu pemerintahan. Selain itu Pemerintah Desa juga sangat dekat dengan masyarakat sehingga segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat maka Pemerintah Desa yang depan dan paling dekat melayani dan mengatasi aspek-aspek tersebut.



Pemerintah Desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan tingkat Desa tidak hanya harus mampu mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan pengembangan wisata yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi pengembangan Desa Wisata tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa (Dian Herdiana, 2019:71).

### **3. Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antara warganya, 2) Adat Istiadat, 3) Komunitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009:115-118).

Sebagaimana kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sikap saling bergantung satu sama lain inilah yang kemudian menjadikan manusia hidup berkelompok. Masyarakat

merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain.

Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas, dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup (Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko, 1984:11).

Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- d. Mereka merupakan suatu sistem.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dan memiliki kemauan yang besar untuk bekerja sama dalam suatu tatanan dan pergaulan yang menghasilkan kebudayaan dan mempunyai kesamaan wilayah.

Desa memiliki masyarakat, masyarakat memiliki Desa. Desa memiliki masyarakat berarti Desa ditopang oleh institusi lokal atau modal sosial. Dalam UU Desa hal ini tercermin pada asas kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan. Sementara masyarakat memiliki Desa bisa disebut sebagai tradisi berdesa, atau menggunakan Desa sebagai arena bernegara dan berpemerintahan oleh masyarakat. dua sisi itu penting karena akan menjadi

fondasi yang kokoh bagi desa yang kuat, maju, demokratis dan mandiri. Pada level yang lebih mikro, bermasyarakat dan berdesa itu menjadi energi bagi Desa membangun, dan sekaligus menjadi faktor bagi keberhasilan dan kegagalan setiap jenis program pembangunan yang bekerja di Desa. Sebagai contoh konkret, Desa Ekasari di Jembrana, Bali. Desa ini inklusif (tiga komunitas Hindu, Islam dan Katolik hidup rukun dan terjadi kolektivitas) dan memiliki bangunan sosial yang kokoh, sehingga program apapun yang masuk ke Desa ini selalu berhasil. Sebaliknya banyak BUMDesa yang gagal, atau proyek-proyek sektoral yang diserahkan kepada masyarakat setempat akhirnya tidak berlanjut dengan baik. Penyebabnya adalah fondasi sosial yang rapuh dan miskinnya tradisi berdesa (Sutoro Eko, 2015:70-71).

Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan desa terutama desa wisata. Hal tersebut bisa dilihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa mereka akan selalu hadir baik secara perwakilan atau keseluruhan untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pembangunan di Desa.

Jika dikaitkan dengan pembangunan desa wisata, maka sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata diperlukannya peningkatan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga masyarakat berperan penting dalam pembangunan serta pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat merupakan unsur utama penggerak utama desa wisata.

Masyarakat secara individu bisa berpartisipasi membangun desa wisata, namun bisa juga tergabung dalam organisasi atau komunitas yang dibentuk sendiri oleh masyarakat. Heywood Andrew (2014:275) berpendapat bahwa dalam masyarakat-masyarakat tradisional, secara khas hanya terdapat sedikit ide tentang individu yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Akan tetapi, manusia dilihat sebagai anggota dari kelompok-kelompok sosial di mana mereka menjadi bagiannya: keluarga, Desa, suku, komunitas lokal mereka dan sebagainya. Kemudian Dwipiyana Ari, et al., (2003:104), berujar bahwa pada masyarakat Desa, bisa dilihat melalui organisasi-organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jaringan sosial, dan nilai lokal lainnya). Organisasi lokal muncul sebagai asosiasi bersama yang berbasiskan agama, okupasi, kegemaran atau aktivitas tertentu. Lebih lanjut Dwipiyana, Ari, et al., (2003:112-115) menyatakan bahwa dilihat dari basisnya (inisiatif pembentukan), organisasi dibedakan dalam dua kategori yaitu korporatis dan partisipatif. Organisasi yang korporatis dibentuk oleh pemerintah dan aktivitasnya lebih banyak berjalan di bawah kontrol pemerintah. Sedangkan organisasi partisipatif dibentuk atas inisiatif masyarakat dan pengelolaannya berbasiskan partisipasi anggotanya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa masyarakat desa akan bergotong royong dalam membangun desa wisata melalui pelembagaan komunitas lokal/Pokdarwis. Keberhasilan dalam membangun desa wisata biasanya timbul dari keinginan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata dapat dipahami sebagai kelompok yang

tumbuh atas inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan berbagai obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata di daerah tempat tinggalnya. Munculnya komunitas lokal (Pokdarwis) karena ada kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif memelihara dan melestarikan dan Pokdarwis sendiri merupakan kelembagaan tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku pariwisata yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab.

#### **4. Desa Wisata**

Desa wisata adalah sebuah kawasan yang berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang ditujukan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang Desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan minuman, cinderamata dan kebutuhan wisata lainnya.

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian dan lain sebagainya yang mampu dikembangkan sebagai objek pariwisata (Hadiwijoyo

dalam Fitri dan Ma'arif, 2017). Sejalan dengan pemahaman tersebut, Muliawan (dalam Atmoko, 2014) mengatakan bahwa desa wisata memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di Kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Selain berbagai keunikan tersebut, kawasan desa wisata juga dipersyaratkan memiliki berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Dalam berbagai berbagai fasilitas ini bisa memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*Homestay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Komponen utama dalam desa wisata adalah akomodasi dan atraksi (Argyo Demartoto, 2009:125) yang dimaksud akomodasi disini adalah sebagian dari tempat tinggal penduduk. Sedangkan atraksi yaitu keseluruhan kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif dalam kegiatan, seperti kursus tari, bahasa, pelatihan kerajinan, dan hal-hal lain yang bersifat spesifik.

## 5. Pembangunan Desa Wisata

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (*trickle down effect*) merupakan mekanisme yang bersifat *top down*. Konsep tersebut dilandasi pula oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi atau *production development center* (Adisasmita, 2006:3). Berdasarkan definisi tentang pembangunan desa tersebut dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dalam menjadikan Desa sebagai basis perubahan.

Menurut Arief Budiman (2000:1) pembangunan selalu identik dengan ekonomi. Pembangunan merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Dari definisi di atas, dapat dijabarkan bahwa setiap individu (*society*) atau negara (*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan

demikian kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Desa sebagai pembangunan wisata, maka pembangunan wisata dapat diartikan sebagai proses menjadikan Desa sebagai objek wisata, dimana Desa meliputi sumber daya alam, masyarakat, budaya dan segala potensi yang ada di dalamnya yang berkaitan satu dengan lainnya. Sehingga, pengembangan desa wisata secara partisipatif menjadi mutlak untuk dilakukan, mengingat elemen yang ada di Desa banyak dan kesemuanya itu saling terkait satu dengan lainnya. Adapun alasan lain mengapa desa wisata perlu dikembangkan dengan pendekatan partisipatif, yaitu : *Pertama*, masyarakat merupakan sasaran utama dari pembangunan desa, sehingga segala aktivitas yang terdapat didalamnya harus diorientasikan dan ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, masyarakat merupakan bagian integral dari Desa itu sendiri, sehingga tidak memungkinkan adanya kebijakan pembangunan desa, termasuk di dalamnya pengembangan pariwisata tanpa adanya pelibatan masyarakat. *Ketiga*, masyarakat memiliki kepemilikan sejarah desa, sehingga masyarakat jauh lebih mengetahui kelemahan dan potensi yang dimiliki Desa dibanding dengan pihak luar, sehingga dalam proses pengembangan desa wisata kontribusi pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan. Dari pemahaman tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat menjadi sentral dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, keberhasilan dari pengembangan desa wisata berbasis masyarakat terletak kepada sejauh



mana masyarakat terlibat dan berkontribusi dalam proses pengembangan wisata akan dan telah dilaksanakan (Dian Herdiana, 2019:70-71).

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. *Pertama*, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. *Kedua*, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. *Ketiga*, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

## **6. Sinergi**

Sinergi berasal dari bahasa Yunani *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi adalah sebuah bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan sesuatu yang optimum. Sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi. Dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yang mana disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan disisi lain sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut (Sofyan dan Garniwa, 2007). Disamping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2011).

Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan *output* yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu :

a. Komunikasi

Sofyan dan Garniwa dalam bukunya *Perilaku Organisasional* (2007) menjelaskan pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu (1) komunikasi yang berorientasi pada sumber yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Sedangkan (2) komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Silalahi (2011) dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Manajemen* menjelaskan bahwa koordinasi adalah integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Sedangkan Moekijat dalam Rahmawati et al. (2014) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu: 1) Hubungan langsung; Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung; 2) Kesempatan awal: Koordinasi dapat dicapai lebih muda dalam tingkatan-tingkatan awal

perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan; 3) Kontinuitas Koordinasi: merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan; 4) Dinamisme; Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern; 5) Tujuan yang jelas: Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif; 6) Organisasi yang sederhana: Struktur organisasi yang sederhana dapat memudahkan koordinasi yang efektif; 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas: Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan; 8) Komunikasi yang efektif; Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik; 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif; Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

Sinergi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melakukan pembangunan desa wisata dapat dilihat dari sejauh mana Pemerintah Desa dalam hal ini membangun komunikasi dengan masyarakat maupun komunitas yang berada di Desa sehingga hubungan tersebut dapat terjalin dalam pembangunan desa wisata yang semuanya telah diatur bersama-sama. Masyarakat desa maupun komunitas memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dikelola guna untuk kepentingan bersama sehingga keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata adalah dukungan dari Pemerintah Desa melalui regulasi yang mudah dimengerti sehingga masyarakat tidak merasa

dirugikan karena sumber daya alam tersebut dikelola bersama dan tetap dijaga kelestarian budaya, adat istiadat yang menjadi pondasi dalam berdesa.

## **7. Inovasi**

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan yang inovatif. Seseorang yang inovatif akan berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru/unik yang berbeda dengan yang sudah ada.

Menurut Rogers dalam Rina (2013:72) mengatakan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Inovasi menurut *Asian Development Bank* adalah sesuatu yang baru, dapat diimplementasikan dan memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas; ini adalah konsep, proses, penerapan dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat.

Mulgan dan Albury dalam Sangkala (2013:31) memperkenalkan bahwa ada 3 tipe inovasi yaitu: (lokal, lintas organisasi dan nasional) yang dihasilkan dalam instansi pemerintahan yang memerankan tiga kebijakan yang saling terkait dan tertarik dengan inovasi:

- a. Inovasi kebijakan: arah dan inisiatif kebijakan baru.
- b. Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk mempercepat inovasi dan penggabungan.

c. Inovasi *top-down* dimana perubahan spesifik didorong melalui penerapan sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta inovasi *bottom-up* dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan memfasilitasi pengembangandan penggabungan (difusi) inovasi yang berasal dari organisasi atau jaringan di dalam sistem. Rogers (2003) mendefinisikan *diffusion* sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu terus-menerus antar anggota sistem sosial. Patut dicatat dalam literatur bahwa fokus pada mekanisme dan proses dimana inovasi diterapkan dan diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau diseminasi) adalah penting sebagai fokus pada aslinya dan kelahiran inovasi (Mulgan dan Albury dalam Sangkala, 2013:32).

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menghasilkan kualitas inovasi yang baik maka diperlukan sinergi yang merupakan konkurensi dari semangat berkelompok atau kebersamaan yang kohesif. Semangat dalam melakukan inovasi baik itu masyarakat, pemerintah dan komunitas ini menjadi produktif, bila dibicarakan karena selalu mencari hal-hal yang baru dan inovatif. Bahkan, dengan semangat inovatif ini akan semakin meningkat bila semua *stakeholder* bekerja keras, tuntas dan berorientasi pada kualitas, yang didukung oleh infrastruktur organisasi yang inovatif. Berkaitan dengan itu, maka masyarakat akan dilibatkan dalam setiap pertemuan baik di tingkat Desa maupun di tingkat RT/RW dan Dusun untuk membahas pemanfaatan sumber daya alam yang berada di Desa.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan yang menjadi fokus di dalam pelaksanaan penelitian, agar data dan informasi yang diambil sesuai dengan yang menjadi kebutuhannya. Maka dari itu, pembahasan tentang Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata tidak melebar dan dapat terfokus, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian guna membatasi uraian-uraian masalah.

1. Jaringan (*networking*) antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa wisata.
2. Keberagaman aktor dalam perumusan kebijakan maupun implementasi pembangunan desa wisata.
3. Hubungan horizontal dan vertikal antara pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan desa wisata.
4. Akseptabel (*Acceptable*) antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan penerimaan pembangunan desa wisata.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Menurut Wardiyanta (2006:5) bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian yang digunakan ini juga untuk mengkaji suatu hipotesis

atau menjawab pertanyaan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. pendapat yang sama juga disampaikan oleh Usman (2009:4) bahwa penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. selanjutnya Usman mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Jenis penelitian deskriptif kualitatif itu diuraikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, di triangulasi, disimpulkan dan di verifikasi (Usman, 2009:129-130).

Dari penjelasan yang diuraikan di atas tentang penelitian deskriptif maka peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran terhadap suatu hal secara sistematis dan berdasarkan fakta yang akurat. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Bogdan dan Taylor (2012:22) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bisa dikatakan bahwa pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (*holistic*). Ini berarti bahwa individu tidak boleh di isolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai suatu keutuhan. Selain itu, metode penelitian

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sehingga deskriptif kualitatif berusaha untuk melakukan penelitian dan menyajikan data, serta menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang diperoleh. Maka selanjutnya adalah tafsiran, dianalisis dan disimpulkan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan informan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti. menurut Arikunto (2006:145), subjek penelitian adalah subjek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika bicara tentang subyek penelitian, sebetulnya kita bicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, responden adalah orang yang diminta kesediaannya untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.

Maka dari itu, subjek penelitian adalah seluruh komponen yang terdapat dalam Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka komponen yang dimaksud adalah terdiri dari :



**Tabel I.1**  
**Data Informan Kalurahan Wonokerto**

No	Nama	J.K	Usia (tahun)	Pekerjaan
1	Riyanto Sulistyو Budi	L	41	Lurah Wonokerto
2	Sarjana	L	52	PNS/Ketua Pengelola Wisata
3	Sarjono	L	76	Petani/Buruh Harian Lepas
4	Kukuh Waluyo	L	51	Petani/Buruh Harian Lepas
5	Dhono Setiawan	L	28	Dukuh Becici
6	Didik Irwanto	L	32	Pamong Desa
7	Agus Sugianto	L	46	Ketua Pokdarwis Wonokerto
8	Sri Lestari	P	48	Ibu Rumah Tangga
9	Ismanto	P	56	Petani

*Sumber: Data Primer*

### **b. Objek Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, yang menjadi objek penelitian adalah Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Bungin (2007:110) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai analisis dan pembahasan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut ini dijelaskan secara ringkas kerja pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

**a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2007:115). Dengan metode observasi ini, maka peneliti akan menggunakan metode ini pada saat berada di lokasi penelitian, kemudian melakukan observasi dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi guna memperoleh data dan gambaran yang sesungguhnya di lokasi penelitian.

Kemudian Satori dan Komariah (2012:105) menjelaskan bahwa observasi adalah melakukan pengamatan langsung obyek guna mengetahui tentang situasi, keberadaan obyek, konteks dan makna pada saat pengumpulan data.

Pada penelitian ini akan diamati secara langsung objek penelitian dan mencatat yang berkaitan dengan Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa wisata.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu terdiri dari pihak pewawancara dan terwawancara. Pihak pewawancara (*interviewer*) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara (*interviewee*) adalah seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (Moleong, 2014:186).

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data atau pencarian data dengan melakukan tanya jawab lisan (*face to face*) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki dalam wawancara, interaksi dan komunikasi sangatlah penting dalam proses penelitian karena pengumpulan informasi yang dilakukan adalah mendatangi langsung informan untuk di mintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya. Mengenai kejadian, fakta maupun pendapat informan. Selain itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan ruang lingkup penelitian dalam melakukan wawancara bersama informan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian-bagian yang terlibat dalam penelitian ini.

### **c. Dokumentasi**

Menurut Moleong (2014:1600) mengemukakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiah sesuai dengan konteks lahiriah tersebut. Kemudian Satori dan Komariah (2010:149) bahwa dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang bersifat konfirmatif dari dokumen-dokumen, dokumentasi kegiatan, data, tabel dan gambar serta sumber lain yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berupa catatan maupun peta yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan tempat penelitian.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Membahas hasil analisis data yaitu berpikir tentang kaitan antara data dan mungkin dengan latar belakang yang menyebabkan adanya persamaan atau perbedaan yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Analisis data bertujuan dalam membuat penyelesaian dan memberi jawaban-jawaban dari setiap rumusan masalah yang sudah dibuat, serta memberikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Setelah peneliti menentukan fokus penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis selama di lapangan (pekerjaan lapangan). analisis selama di lapangan ini, menggunakan model analisis data kualitatif versi Miles dan Huberman dalam (Usman dkk, 2009:85). Selanjutnya Miles dan Huberman (1992:15) dalam Moleong (2014) menyatakan dalam analisis kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus (interaktif) sampai tuntas sampai menjadi data jenuh. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu:

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa penting, merangkum, serta membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Reduksi data nantinya akan menghasilkan gambaran dan langkah yang jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian data yang diperoleh peneliti dari lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat secara teliti, rinci, dan sistematis. Setiap kali terjun ke lapangan tentunya data yang terkumpul semakin banyak. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil

observasi dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila sewaktu-waktu diperlukan.

### **b. Penyajian Data**

Dalam penyajian data bisa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabung informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data hasil penting reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data juga dapat berbentuk matriks, grafik dan bagan. Dengan penyajian data ini, peneliti mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat direncanakan kerja selanjutnya.

### **c. Verifikasi Data**

Verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam analisis data selama di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti sampai pada verifikasi data selama dilapangan baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek dalam penelitian. Tahap terakhir penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data dari keseluruhan tahap (analisis data). Dalam tahapan ini peneliti berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

**BAB II**  
**PROFIL KALURAHAN WONOKERTO**  
**DAN PROFIL DESA WISATA PULESARI**

**A. Profil Kalurahan Wonokerto**

**1. Sejarah Kalurahan Wonokerto**

Wonokerto merupakan sebuah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya Wonokerto mempunyai nama Desa Wonokerto. Karena ada perubahan nomenklatur pada Undang-Undang Keistimewaan maka dari Desa diubah menjadi Kalurahan.

Pada mulanya Desa Wonokerto merupakan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Kalurahan yakni, Kalurahan Garongan, Kalurahan Ledoklempung, Kalurahan Tunggularum, dan Kalurahan Dadapan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintah Kalurahan, maka Kalurahan-Kalurahan tersebut digabung menjadi satu Desa otonom dengan nama Desa Wonokerto. Wonokerto kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

**2. Kondisi Geografis Kalurahan Wonokerto**

**a. Batas Administrasi**

Secara administratif Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wonokerto berbatasan dengan Kalurahan lain diantaranya dari sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Girikerto, Kalurahan Turi, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliurang, Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Donokerto, Kaluraha Bangukerto, Kapanewon Turi dan di sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Girikerto, Kecamatan Turi, Taman Nasional Gunung Merapi.

Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 Padukuhan yang terdiri dari 64 RT dan 29 RW dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.1**

**Pembagian Wilayah Padukuhan, RW/RT Kalurahan Wonokerto**

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tunggularum	2	4
2	Gondoarum	2	4
3	Sempu	2	7
4	Banjarsari	3	5
5	Manggungsari	2	4
6	Imorejo	2	4
7	Jambusari	3	4
8	Dukuhsari	2	4
9	Kembang	2	4
10	Pojok	2	4
11	Becici	2	5
12	Dadapan	3	6
13	Sangurejo	2	5
<b>Total</b>		<b>29</b>	<b>64</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Pada hakikatnya Kalurahan Wonokerto menggambarkan potret Kalurahan secara *eksisting* beserta persoalannya untuk dikaji lebih mendalam untuk pengembangan Kalurahan kedepan dalam jangka enam tahun yang berfokus pada tiga sektor yaitu Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata.

## b. Kondisi Fisik Wilayah

Luas wilayah Kalurahan Wonokerto 1.547 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/industry, ladang/tegalan. perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Penggunaan lahan Kalurahan Wonokerto**

No	Nama Padukuhan	Jenis Penggunaan Lahan								
		Sawah/Pertanian	Ladang/Tegalan	Industri	Perkebunan	Perikanan	Perdagangan dan Jasa	Hutan	Lain-lain	Jumlah
1	Tunggularum	5	80	-	40	44	-	17	4	190
2	Gondoarum	10	38	-	50	10	-	-	-	108
3	Sempu	-	1,2	-	34	51,3	-	-	-	86,3
4	Banjarsari	74	13,5	-	1,9	4,9	-	-	-	94,3
5	Manggung Sari	4	20,5	-	53,5	8	-	-	-	86
6	Imorejo	25,3	5,4	1	1	31,5	-	-	-	64,2
7	Jambusari	37	10	-	-	2	-	-	1	50
8	Dukuhsari	36	-	-	10	9	-	-	-	55
9	Kembang	8	-	-	45	7,5	1	-	-	61,55
10	Pojok	5	2,7	-	14,6	21	-	-	-	43,3
11	Sangurejo	28	4	-	-	8	-	-	-	40
12	Becici	3,4	2,8	0,2	31,8	25,8	2,9	-	-	66,9
13	Dadapan	0,7	9	-	32,5	15	-	-	-	57,2
<b>Total</b>		<b>236,4</b>	<b>187,1</b>	<b>1,2</b>	<b>314,3</b>	<b>238</b>	<b>3,9</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1002,9</b>
Presentase (%)		23,5%	18,66%	0,12%	31,3%	23,73%	0,39%	1,70%	0,50%	100,0%

Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto

Dari tabel di atas dapat dilihat luasan wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam hal sumber daya pangan dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto. Karakteristik tersebut didominasi oleh luas



perkebunan dengan persentase 314,3% diikuti area pertanian sebesar 23,57% dan wilayah pemukiman sebesar 23,73%.

### **c. Kondisi Topografi**

Kalurahan Wonokerto berada pada sisi utara dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wonokerto yang letaknya berada pada sisi lereng barat daya dari Gunung Merapi yang berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut 600 mdpl, dengan banyaknya curah hujan 3.908 mm/th dan suhu udara rata-rata 27°C. Dengan ketinggian tersebut, sebagian besar wilayahnya adalah pertanian dan perkebunan.

## **3. Kondisi Demografi Kalurahan Wonokerto**

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari perkembangan Desa dan Kalurahan tahun 2020. Data demografi ini penting bagi pemerintah Kalurahan untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah Angkatan kerja. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Wonokerto dapat membantu keadaan masyarakat dengan data yang tersedia. Data demografi meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk dan jumlah penduduk yang berubah setiap waktu. Jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto pada tahun 2020 adalah 10.079 jiwa dengan rincian 5.062 jiwa laki-laki dan 5.017 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Wonokerto adalah 3.085 KK.

### **a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari potensi desa dan hasil survey oleh masyarakat. Data-data kependudukan tersebut meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan,

mata pencaharian dan juga jumlah penduduk berdasarkan agama. Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel II.3**  
**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Jumlah KK
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1	Tunggularum	308	395	703	190
2	Gondoarum	288	295	583	194
3	Sempu	557	535	1092	362
4	Banjarsari	394	387	781	236
5	Imorejo	337	359	649	185
6	Manggungsari	335	314	649	185
7	Jambusari	354	358	722	219
8	Dukuhsari	362	312	674	200
9	Kembang	313	359	672	192
10	Pojok	340	285	625	187
11	Becici	502	457	959	298
12	Dadapan	487	486	973	296
13	Sangurejo	498	498	996	297
<b>Total</b>		<b>5.075</b>	<b>5.050</b>	<b>10.125</b>	<b>3.085</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah penduduk yang berada pada setiap Padukuhan yang terdapat di Kalurahan Wonokerto bervariasi baik laki-laki maupun perempuan. Sementara untuk jumlah keseluruhan di Kalurahan Wonokerto jumlah yang paling padat yaitu laki-laki dengan jumlah 5.075 jiwa, sedangkan penduduk perempuan dengan jumlah 5.050 jiwa. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah antara laki-laki dan perempuan yang ada di Kalurahan Wonokerto masih terhitung baik serta kesejahteraan dan pembangunan masih terhitung maju.

**b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Secara umum tingkat

pendidikan masyarakat merupakan salah satu barometer mengenai kesejahteraan. Kalurahan Wonokerto sendiri dalam peningkatan tingkat melek angka dan pemberantasan buta baca berhasil. Berikut data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.4**  
**Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar	229	287	516
2	Tamat SD	915	820	1735
3	Tamat SLTP	965	977	1942
4	Tamat SLTA	2219	2045	4264
5	Sarjana	267	473	740
<b>Jumlah</b>		<b>4.595</b>	<b>4.602</b>	<b>9.197</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Jika dilihat tabel diatas bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Wonokerto dengan ijazah terakhir SLTA menempati porsi yang terbesar yaitu 4.264 jiwa sedangkan yang terkecil adalah tidak tamat Sekolah Dasar. Selain itu jumlah penduduk berpendidikan SLTP menempati urutan kedua terbanyak 1.942 jiwa. Sedangkan penduduk berpendidikan terakhir SD menempati urutan ketiga sebanyak 1.735 jiwa. Selanjutnya yang menempati urutan keempat terbanyak yaitu lulusan pendidikan Sarjana sebesar 740 jiwa.

#### **c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Wonokerto sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel II.5**

**Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Pertanian	925	855	1.780
2	Pertambangan	57	15	72
3	Listrik, dan gas	33	12	45
4	Sektor bangunan	576	178	764
5	Perdagangan, hotel dan restoran	357	221	578
6	Industri pengolahan	55	21	76
7	Pengangkutan dan komunikasi	105	113	218
8	Jasa keuangan dan persewaan	186	123	309
	<b>Total</b>	<b>4.043</b>	<b>3.475</b>	<b>7.518</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Berdasarkan tabel di atas, bisa diamati bahwa jumlah penduduk berdasarkan yang mempunyai pekerjaan sebesar 7.518 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 4.043 orang dan perempuan berjumlah 3.475 orang. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto sebagian besar berada pada sektor pertanian yang berjumlah 1.780 orang. Sektor pertanian telah menjadi pekerjaan yang sangat mendukung masyarakat ditambah lagi dengan lahan yang dikelola sendiri oleh masyarakat karena sektor tersebut memegang peran penting bagi masyarakat.

**d. Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Kalurahan Wonokerto mayoritas memeluk agama Islam dan ada juga masyarakat yang menganut agama Katolik, Kristen dan Hindu yang bisa dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

**Tabel II.6**  
**Data Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Islam	4657	4566	9223
2	Kristen	59	50	109
3	Katolik	357	432	780
4	Hindu	2	2	4
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
<b>Total</b>		<b>5.075</b>	<b>5.050</b>	<b>10.125</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk menurut agama yaitu agama Islam dengan jumlah penganut sebanyak 9.223 orang, Katolik sebanyak 780 orang dan Kristen sebanyak 109 orang serta penganut agama Hindu adalah 4 orang. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat memeluk agama Islam namun tingkat kerukunan dan toleransi umat beragama sangat tinggi. Hal tersebut mampu mendorong nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat.

#### **4. Kondisi Sosial Ekonomi Kalurahan Wonokerto**

##### **a. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Wonokerto yang penuh kebersamaan, kegotongroyongan hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan masih dijunjung tinggi, sehingga setiap ada persoalan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah mufakat. Disamping itu, hubungan kekerabatan dan keterikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling bantu-membantu baik dalam hal kesusahan maupun ketika masyarakat punya hajatan seperti kenduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari

besar Islam maupun peringatan -peringatan lainnya. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan berjalan aktif. Adapun organisasi-organisasi yang ada di seluruh wilayah Kalurahan Wonokerto pada masing-masing padukuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.7**  
**Organisasi Kemasyarakatan**

No	Padukuhan	Jenis organisasi	Penanggung Jawab
1	Tunggularum	Arisan, siskamling, PKK	Ketua RT, Kader PKK
2	Gondarum	P3A, Karang taruna, PKK, Posyandu Pertemuan RT	Kader PKK Ketua RT
3	Sempu	Siskamling	Dukuh Ketua RW Ketua RT
4	Banjarsari	Siskamling, Karang taruna	LPMD
5	Manggungsari	Siskamling Pertemuan RT	Dukuh, RT/RW
6	Imorejo	Simpan Pinjam Arisan Siskamling, Pengajian, Merti bumi	Dukuh
7	Jambusari	Siskamling	Dukuh
8	Dukuhsari	Arisan, Pengajian, Kenduri	Dukuh, Takmir
9	Kembang	Siskamling	Dukuh
10	Pojok	Siskamling,	Ketua RT, Kepala Dukuh
11	Sangurejo	Siskamling	Ketua RT dan Dukuh
12	Becici	Siskamling	Dukuh dan Ketua RT
13	Dadapan	LPMD, PKK, Lansia, Karang Taruna, Kelompok Ternak Pengajian	Dukuh, RT/RW, Ta'mir Masjid

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Dari tabel di atas bahwa organisasi kemasyarakatan yang berada di Kalurahan Wonokerto terdapat 13 jenis organisasi yang berbeda-beda dan tersebar di setiap Padukuhan di Wonokerto. Dengan adanya organisasi kemasyarakatan dapat menunjukkan bahwa pembangunan di Kalurahan Wonokerto sudah maju.

#### **b. Kondisi Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kalurahan Wonokerto terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah pertanian termasuk di dalamnya perkebunan salak, perikanan dan peternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani untuk sektor pertanian

didominasi oleh pertanian/perkebunan salak pondoh yang merupakan pendapatan utama para petani dan merupakan sektor yang telah mengangkat perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto. Sektor jasa dan perdagangan meliputi padukuhan Tunggularum, Gondoarum, Sempu, Banjarsari, Pojok dan Sangurejo yang dilalui jalan kabupaten dan provinsi banyak berdiri swalayan, warung makan, toko kelontong, pasar desa, toko bahan bangunan, perbengkelan dan lain-lain.

Sektor perikanan di padukuhan kembang, pojok sebagian Sangurejo karena wilayah itu mempunyai ketersediaan sumber daya air baik di musim hujan maupun musim kemarau. Di Wonokerto juga memiliki obyek wisata baik yang dikelola oleh Kalurahan maupun oleh masyarakat yaitu Wisata Bumi Perkemahan di Padukuhan Pojok, Wisata Alam di Padukuhan Tunggularum. Sedangkan peternakan yang dikembangkan di Kalurahan Wonokerto adalah ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek/itik, burung puyuh dan ayam.

### **c. Kondisi Budaya**

Budaya yang berkembang di Kalurahan Wonokerto adalah masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan masyarakat yang masih tinggi. Keberadaan kesenian di Kalurahan Wonokerto sangat beragam yang bernuansa adat jawa seperti kesenian Jatilan, Kurbo Siswo, Dayakan, Badwi dan Wayang orang sampai yang bernuansa Islami seperti Hadroh. Semua berkembang dengan baik dikarenakan masyarakat Kalurahan Wonokerto selain agamis juga mempunyai budaya kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota-anggota masyarakat disekitarnya. Warga

masyarakat Wonokerto juga masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka sebagai orang Jawa seperti masih menjalankan atau melaksanakan berbagai upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan hidup atau *life circle*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Upacara Mitoni adalah upacara selamat pada saat usia kehamilan mencapai genap tujuh bulan.
- b. Upacara Puputan yaitu upacara selamat pada saat tali pusat bayi sudah lepas/mengering.
- c. Jagoan yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih tujuh malam (satu minggu).
- d. Selapanan yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 hari sebagai ucapan rasa syukur.
- e. Upacara kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
- f. Upacara Khitanan yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai memasuki akil baligh menjadi laki-laki dewasa.
- g. Upacara pernikahan dengan berbagai pernik tradisi Jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.
- h. Upacara Adat Merti Bumi sebagai *icon* Kalurahan Wonokerto yang diwujudkan atas rasa syukur kepada Tuhan.
- i. Upacara Adat Pager Bumi yang secara garis besar hampir sama dengan upacara Merti Bumi.



Adapun kegiatan budaya yang ada di Kalurahan Wonokerto yaitu upacara-upacara seperti keterangan di atas dilaksanakan berbeda-beda seperti Merti Bumi dimana pelaksanaan Merti Bumi, Nyadran dan Jatilan serta Nyadran dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Adapun kegiatan budaya lain seperti Badui, Hadro dan Tari Topeng Ireng dilaksanakan setiap seminggu sekali yang dilaksanakan sebagai latihan. Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap per minggu di setiap Padukuhan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Pelaksanaan gotong royong merupakan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan dengan sukarela oleh masyarakat yang ada di setiap Padukan.

Hal ini selain kegiatan tolong menolong juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar warga masyarakat Kalurahan Wonokerto. Kelompok RT (Rukun Tetangga) kegiatannya cukup menonjol terutama dalam pembangunan baik dari pekerjaan dan segi biaya meski demikian kesatuan warga dusun tetap terpelihara dengan baik. Even-even penting seperti peringatan hari-hari besar Nasional, hari besar keagamaan dan kegiatan adat dilaksanakan rutin setiap tahunnya kegiatan tersebut. Sehingga dalam kegiatan tersebut sebagai pembelajaran generasi penerusnya serta memberikan kesempatan kepada grup-grup seni budaya yang ada di dalamnya untuk mengekspresikan kemampuannya. Semua kegiatan ini adalah sebuah bentuk relasi masyarakat Kalurahan Wonokerto yang mengusung budaya kekeluargaan.

## **5. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Wonokerto**

Jalan merupakan sarana penghubung baik antar dusun, antar padukuhan, antar Kalurahan, antar Kecamatan, antar Kabupaten maupun antar Provinsi. Komposisi status jalan yang ada di Kalurahan Wonokerto adalah

jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kalurahan dan jalan lingkungan. Jalan Provinsi di Kalurahan Wonokerto menghubungkan antara Kalurahan Candibinangun dan Kalurahan lainnya seperti Kalurahan Wonokerto (Kecamatan Turi), Kalurahan Margorejo dan Wonokerto (Kecamatan Tempel). Berikut adalah tabel kondisi jaringan jalan Kalurahan Wonokerto sebagai berikut:

**a. Fasilitas Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto**

**Tabel II.8**

**Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto**

No	Nama Padukuhan (Ruas Jalan)	Status Jalan				Tim RPJMDesa Jalan				Kondisi		
		Provinsi	Kabupaten	Kalurahan	Lingkungan	Aspal	Makadam	Rabat Beton/Cor	Tanah	Baik	Sedang	Rusak
1	Tunggularum	1.000	2.500	3.400	3.500	-	-	3.400	4.000	2.500	400	6.900
2	Gondoarum	1.000	750	3.050	1.000	-	750	3.050	800	1.500	2.500	4.800
3	Sempu	616	2.400	4.620	6.361	-	445	830	2.384	3.422	1.830	7.636
4	Banjarsari	1.500	700	7.400	3.250	-	1.850	4.500	1.500	6.900	1.200	9.600
5	Manggungsari	-	1.850	5.545	1.350	-	3.050	2.995	1.150	2.650	3.595	7.395
6	Imorejo	1.000	800	7.100	3.740	-	300	4.860	2.940	300	5.660	8.900
7	Jambusari	-	3.150	2.200	3.150	-	1.290	910	1.000	3.550	800	5.350
8	Dukuhsari	-	1.000	6.200	1.850	-	1.300	4.050	900	1.650	4.650	7.200
9	Kembang	1.300	1.800	1.220	3.100	400	-	820	-	3.150	1.170	4.320
10	Pojok	1.250	2.800	2.365	2.600	-	1.515	2.300	2.500	2.065	1.850	6415
11	Sangurejo	900	1.200	1.800	3.100	-	800	-	-	3.000	900	3.900
12	Becici	-	5.300	6.750	9.140	750	150	2.010	4.750	4.850	2.450	12.050
13	Dadapan	-	9.550	4.530	11.070	2.910	-	100	7.680	1.750	4.650	14.080

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Jalan Kalurahan yang ada menghubungkan antar padukuhan, seluruh padukuhan sudah terkoneksi menjadi sebuah sistem jaringan jalan Kalurahan jalan lingkungan adalah jalan-jalan yang berada di lingkungan pemukiman. Hampir seluruh padukuhan di Kalurahan Wonokerto jenis konstruksi jalannya sudah beraspal. Selain aspal jenis lainnya adalah cor beton dan jalan tanah. Kondisi jalan yang ada di Kalurahan Wonokerto bervariasi mulai dari berkondisi baik, kondisi sedang sampai dengan kondisi rusak.

## b. Fasilitas Pendidikan

**Tabel II.9**

### **Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidikan**

No	Nama Padukuhan	PAUD	TK	SD	SMP	SMU/SMK
1	Tunggularum	1	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	-	-
3	Sempu	1	1	1	-	-
4	Banjarsari	-	-	1	1	-
5	Manggungsari	-	1	1	-	-
6	Imorejo	-	1	1	-	-
7	Jambusari	1	-	1	-	-
8	Dukuhsari	1	-	-	-	-
9	Kembang	-	1	1	-	-
10	Pojok	-	-	-	-	-
11	Sangurejo	1	2	1	1	1
12	Becici	1	1	-	-	-
13	Dadapan	-	-	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Wonokerto cukup memadai mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dari 13 padukuhan, 7 padukuhan memiliki fasilitas PAUD, pendidikan TK terdapat di 6 padukuhan. Sementara untuk SD juga tersebar di 7 padukuhan. Pendidikan SMP dan SMU/SMK hanya ada 1 yang terletak di Padukuhan Sangurejo karena padukuhan tersebut terletak di wilayah yang dekat pusat pemerintahan Kecamatan Turi. Adapun untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi belum ada. Untuk mendapatkan pelayanan pendidikan tersebut, pelajar harus keluar dari wilayah Wonokerto yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang dituju.

### c. Fasilitas Kesehatan

**Tabel II.10**

**Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan**

No	Nama Padukuhan	PUSKESMAS PEMBANTU	POSYANDU	POSKESDES
1	Tunggularum	-	1	-
2	Gondoarum	1	1	-
3	Sempu	1	1	-
4	Banjarsari	1	3	1
5	Manggungsari	-	1	-
6	Imorejo	-	1	1
7	Jambusari	-	1	-
8	Dukuhsari	-	1	-
9	Kembang	-	1	1
10	Pojok	-	1	-
11	Sangurejo	-	3	-
12	Becici	-	4	-
13	Dadapan	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>20</b>	<b>3</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Fasilitas Kesehatan yang terdapat di Kalurahan Wonokerto terdiri dari 3 buah Puskesmas Pembantu yang terdapat pada Padukuhan Gondoarum, Padukuhan Sempu dan Padukuhan Banjarsari dengan jumlah sebaran berjumlah 1 buah Puskesmas Pembantu. Kemudian Kalurahn Wonokerto mempunyai 20 Posyandu yang tersebar di setiap Padukuhan serta terdapat 3 buah Poskesdes yang tersebar pada Padukuhan Banjarsari, Padukuhan Imorejo dan Padukuhan Kembang.

#### d. Fasilitas Peribadatan

**Tabel II.11**  
**Jumlah Sebaran Fasilitas Peribadatan**

No	Nama Padukuhan	Masjid	Mushola/ Langgar	Gereja	Klenteng/ Vihara
1	Tunggularum	1	-	-	-
2	Gondorarum	1	1	-	-
3	Sempu	4	1	-	-
4	Banjarsari	3	-	-	-
5	Manggungsari	1	-	-	-
6	Imorejo	4	-	-	-
7	Jambusari	2	2	-	-
8	Dukuhsari	2	1	-	-
9	Kembang	2	2	-	-
10	Pojok	3	3	-	-
11	Sangurejo	6	1	-	-
12	Becici	4	3	-	-
13	Dadapan	3	1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto

Fasilitas peribadatan yang berada di Kalurahan Wonokerto terdiri dari Masjid dan Mushola/Langgar. Hampir semua Padukuhan di Kalurahan Wonokerto telah mempunyai tempat ibadah berupa Masjid dan Mushola/Langgar dengan jumlah sebaran yang berbeda-beda. Sedangkan tempat peribadatan yang lain seperti tempat ibadah Gereja dan Klenteng/Vihara tidak ada karena dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Wonokerto ada beragama Islam.

#### e. Fasilitas Perekonomian

Fasilitas ekonomi dan perdagangan yang terdapat di Kalurahan Wonokerto sudah terdiri dari pasar *modern*/swalayan supermarket, pasar tradisional, toko bangunan, warung/kios dan warung PKL. Hal-hal tersebut bisa dilihat pada berikut ini:

Tabel II.12

## Jumlah Sebaran Fasilitas Perekonomian

No	Padukuhan	Pasar Modern/ Swalayan/ Supermarket	Pasar Tradisional	Toko Bahan Bangunan	Ruko	Toko	Warung/ Kios	Warung PKL
1	Tunggularum	1	-	-	-	3	6	1
2	Gondoarum	2	-	-	1	1	4	-
3	Sempu	3	1	2	-	5	29	8
4	Banjarsari	2	-	1	-	3	8	2
5	Manggungsari	-	-	-	-	-	7	-
6	Imorejo	2	-	-	-	-	8	-
7	Jambusari	1	-	-	-	-	7	2
8	Dukuhsari	-	-	1	-	-	11	-
9	Kembang	-	1	-	-	-	8	-
10	Pojok	1	-	-	-	-	11	1
11	Becici	-	-	-	8	14	4	4
12	Dadapan	-	-	-	-	-	13	-
13	Sangurejo	6	-	3	-	-	10	-
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>126</b>	<b>18</b>

Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas ekonomi di Kalurahan Wonokerto sangat memadai dan memenuhi keperluan masyarakat, ini berarti pembangunannya sudah cukup baik. Selain itu fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di Kalurahan Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadai terutama untuk tingkat layanan dengan skala lokal. Pasar yang ada di Kalurahan Wonokerto tidak hanya melayani wilayah Kalurahan Wonokerto saja, akan tetapi juga melayani Kalurahan di sekitarnya.

#### f. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum yang terdapat di Kalurahan Wonokerto antara lain balai kantor Kalurahan, balai pertemuan, kantor dinas, gardu jaga, stasiun radio amatir, bengkel kerja, kantor parpol, dan kantor lainnya. Yang paling banyak ada gardu jaga dan tersebar di setiap Padukuhan di Kalurahan Wonokerto. Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.13**

**Jumlah Sebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

No	Nama Padukuhan	Balai Kantor Kalurahan	Balai Pertemuan	Kantor Dinas	Gardu Jaga	Radio/TV	Bengkel Kerja	Kantor KUA	Kantor Lain-lain
1	Tunggularum	-	1	-	4	-	-	-	-
2	Gondoarum	-	-	-	4	-	-	-	-
3	Sempu	-	-	-	6	2	-	-	2
4	Banjarsari	-	1	-	3	-	-	-	-
5	Manggungsari	-	-	-	2	-	-	-	-
6	Imorejo	1	1	-	4	-	-	-	-
7	Jambusari	-	-	-	4	-	4	-	-
8	Dukuhsari	-	-	-	5	-	5	-	-
9	Kembang	-	1	-	3	-	7	-	-
10	Pojok	-	-	-	4	-	1	-	-
11	Sangurejo	-	-	1	4	-	6	1	-
12	Becici	-	-	-	8	-	2	-	-
13	Dadapan	-	-	-	6	-	2	-	-
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan umum berupa Gardu Jaga berada pada setiap Padukuhan dengan jumlah sebaran yang berbeda-beda dan Gardu Jaga yang paling banyak terdapat pada Padukuhan Becici. Fasilitas umum Gardu Jaga merupakan tempat untuk menjaga keamanan di tengah-tengah perumahan dan dapat mempengaruhi klien dalam memilih tempat hunian karena faktor keamanan dan lainnya.

**6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Wonokerto**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di

tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT), Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Dalam Pasal 2 dijabarkan juga bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Berikut adalah tabel pemerintah Kalurahan Wonokerto berdasarkan nama dan jabatan sebagai berikut:

**Tabel II.14**

**Data Keanggotaan Pemerintah Kalurahan Wonokerto**

No	NAMA	JABATAN
1	Riyanto Sulistyو Budi, S.E	Lurah
2	Samijo, S,Sos	Carik
3	Didik Irwanto, A.Md	Jogoboyo
4	Taufiq Armunanto, S.Kom	Ulu-ulu
5	Baroji	Kamituwo
6	Fera Arista Wardani, S.Pd	Toto Laksono
7	Septefi Dwi Prasetyo, S.E	Dhanarto
8	Drs. Eko Wahyudi	Pangripto
9	Kristanto	Dukuh Tunggularum
10	Mustijo	Dukuh Gondoarum
11	Ridwan	Dukuh Sempu
12	Supangat	Dukuh Banjarsari
13	Rahmad Badawi	Dukuh Imorejo
14	Tri Hartono	Dukuh Manggungsari
15	Rebatman	Dukuh Jambusari
16	Ganjar Asmara	Dukuh Dukuhsari
17	Rahmat Hidayat	Dukung Kembang
18	Yayan Bintarto	Dukuh Pojok
19	Dhono Setiawan	Dukuh Becici
20	Sarmin	Dukuh Dadapan
21	Sehadi	Dukuh Sangurejo
22	Yunita Sari Widayanti, A.Md	Staf Carik
23	Danny Roesdhiana, A.Md	Staf Jogoboyo
24	Agus Hardono, A.Md	Staf Kamituwo
25	Aditya Yosefin Damarjati, S.E	Staf Ulu-ulu
26	Feri Fitanto, S.Pd	Staf Kepala Urusan Dhanarto
27	Sulastri, S.Si	Staf Kepala Urusan Toto Laksono
28	Marjuni	Staf Pangripto
29	Farida Ika Rahman, S.Kep	Staf Pangripto
30	Jumingin	Penjaga Kantor

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*



Kepala Kalurahan tidak berdiri secara sendiri tetapi juga didukung oleh perangkat-perangkat di bawahnya yang menjadi instrumen dalam keberlangsungan terhadap pelayanan dan program kerja Kalurahan menuju kemajuan dan kemandirian. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.

Di Sisi yang lain juga ada kontrol terhadap proses kerja pemerintah Kalurahan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam hal ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dipilih secara demokratis kemudian menjadi wakil dari kelompok masyarakat yang menjadi mitra pemerintah Kalurahan dalam menjalankan proses roda organisasi pemerintah Kalurahan Wonokerto.

Berikut daftar keanggotaan BPD Kalurahan Wonokerto yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.15**

**Daftar Nama Anggota BPD Kalurahan Wonokerto**

No	Nama	Jabatan
1	Sutarja	Ketua
2	Sunarja, A.Md	Wakil Ketua
3	Siti Yuningsih, A.Md	Sekretaris
4	Sugito, S.Pd	Ketua Pokja Pemerintahan
5	Dari Sri Anto Hadi, ST	Ketua Pokja Pembangunan
6	Sunyoto	Anggota
7	Sri Eka Mardiyana	Anggota
8	Sumarjana	Anggota

*Sumber: RPJMKal 2022-2027 Kalurahan Wonokerto*

Demi keberlangsungan pemerintahan yang baik (*good governance*) BPD sebagai wakil kelompok masyarakat memiliki peran penting yaitu sebagai penampung dan aktor penyalur aspirasi masyarakat memiliki peran penting yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa

kepada pemerintah Kalurahan serta mengawasi dan memberi evaluasi terhadap proses pemerintahan di Wonokerto.

## **B. Profil Desa Wisata Pulesari**

### **1. Sejarah Desa Wisata Pulesari**

Pulesari merupakan salah satu Dusun yang berada di wilayah Kalurahan Wonokerto persis nya terletak di sisi barat lereng gunung merapi dan mempunyai potensi Sumber Daya Alam serta Adat Istiadat yang sampai saat ini masih dijaga dengan baik oleh masyarakat. Hal ini memicu adanya upaya untuk membentuk Dusun Pulesari sebagai objek Desa Wisata yang terkenal bagi seluruh orang yang akan berkunjung ke Dusun Pulesari.

Pasca gunung merapi tahun 2010, membuat masyarakat yang berada di sisi barat lereng gunung merapi terdampak berkaitan dengan ekonomi, karena sebagian besar masyarakat Dusun Pulesari berprofesi sebagai petani salak. Akibatnya, sumber pendapatan masyarakat yang bersumber dari pada perekonomian pertanian salak mengalami penurunan karena tanaman salak yang terkena abu vulkanik. Sehingga untuk memulai dari awal lagi membutuhkan proses perawatan, penyulaman dan pemulihan ekonomi dengan kurun waktu 2 tahun untuk mengembalikan seperti dulu lagi.

Proses munculnya gagasan Desa Wisata Pulesari berawal dari dua tahun pasca erupsi gunung merapi tahun 2010. Potensi Sumber Daya Alam yang masih asri, nilai-nilai adat dan istiadat serta budaya yang masih dijaga dengan baik membuat lahirnya inisiasi untuk mengembangkan Dusun Pulesari sebagai tempat berwisata bagi masyarakat. Pak Sarjana dan pak Didik Irwanto sebagai inisiator yang memprakarsai lahirnya Desa Wisata

Pulesari serta beberapa tokoh masyarakat yang bersama-sama membangun Desa Wisata Pulesari. Proses untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk mencetuskan ide desa wisata mendapatkan berbagai penolakan dari masyarakat karena minimnya pengalaman dalam pengelolaan desa wisata dan kurangnya literasi yang diterima serta masyarakat yang harus beradaptasi lagi dengan pertanian salak yang selama ini telah ditekuni. Namun upaya dan kerja keras untuk meyakini masyarakat bahwa Dusun Pulesari mempunyai potensi yang bisa dikembangkan dalam arena desa wisata membuahkan hasilnya. Dengan begitu gagasan yang ditawarkan untuk membangun desa wisata dengan konsep dari masyarakat, untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat menjadi pijakan bersama untuk mengelola Desa Wisata Pulesari. Sehingga dari proses pembangunan sampai pada tahap pengelolaan Desa Wisata Pulesari secara langsung dikelola oleh masyarakat yang notabene sebagai investor tanpa adanya kerjasama dari pihak lain.

Desa wisata ini merupakan Desa Wisata yang berdiri sendiri yang berawal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat berdasar semangat gotong royong membangun sebuah Desa serta komitmen bersama dan banyak potensi yang ada di wilayah yang perlu kami lestarikan dan kembangkan maka dari itu memunculkan sebuah gagasan sebuah ide untuk membentuk sebuah desa wisata. Awal mulai mencanangkan konsep pariwisata pada tanggal 26 Mei 2012 dan dilakukan *launching* desa wisata dan diresmikan pada tanggal 09 November 2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

Desa wisata ini menyajikan sebuah wisata Alam dan Budaya Tradisi dalam artian Desa yang mempunyai potensi alam yang luar biasa sehingga perlu kita lestarikan serta dikembangkan dan dimanfaatkan sewajarnya tanpa merubah esensi dari pada kawasan pedesaan. Budaya Tradisi merupakan wujud dari Desa yang ada di masyarakat agar tidak punah ditelan zaman modernisasi ini.

Desa Wisata ini bertujuan untuk memberdayakan SDM dan SDA yang ada agar eksistensi Desa Wisata ini dapat dikenal dan diakui oleh masyarakat luas sehingga bisa menjadikan atraktif tersendiri bagi wisatawan yang hanya sekedar datang untuk menikmati suasana pedesaan yang ada di wilayah kami.

## **2. Letak Administratif, Demografi dan Geografi**

Secara administratif Dusun Pulesari merupakan salah satu pembagian dari kewilayahan Padukuhan Becici yang berada di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Dusun Pulesari memiliki batas-batas dengan wilayah yang diantaranya dari sebelah timur berbatasan dengan Dusun Arjosari, di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Bangunkerto, Dusun Wonosari, di sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kopen dan di sebelah utara berbatasan dengan Dusun Ledok Lempong.

Secara demografi masyarakat Dusun Pulesari merupakan Desa yang mempunyai akulturasi yang berbeda dengan Dusun yang lain itu merupakan keanekaragaman potensi yang ada di Indonesia tetapi tetap memiliki satu kesatuan yang sama terbukti dari semangat gotong royong masyarakat mengolah seni dan budaya yang ada dengan adanya Kegiatan Rutin Tahunan

yaitu Upacara Adat Pager Bumi yang selalu dilaksanakan setiap Bulan Sapar Rabu Pungkasan.

Luas wilayah Desa Wonokerto 20,5 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang/tegalan, perkebunan, pemukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.16**  
**Penggunaan Lahan Dusun Pulesari**

No	Nama Dusun	Jumlah Penggunaan Lahan							Lain-lain	Jumlah
		Sawah/Pertanian	Ladang/Tegalan	Industri	Perkebunan	Pemukiman	Perdagangan dan Jasa	hutan		
1	Pulesari	0,25	1,00	-	8,50	9,50	-	-	-	20,5

*Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari*

Dari luas wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam hal sumber daya alam pangan dan mata pencaharian penduduk Dusun Pulesari.

### 3. Logo dan Arti Desa Wisata

**Gambar II.1**  
**Logo Desa Wisata Pulesari**



*Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari*

- a. Gambar Rumah Wacana Coklat/Orange yang artinya merupakan warna netral yang natural, hangat, membumi dan stabil, menghadirkan kenyamanan, memberi kesan anggun dan elegan. Dapat memberi keyakinan dan rasa aman, warna yang akrab dan menenangkan, bisa mendorong komitmen.
- b. Gambar Gunung Warna Hijau yang artinya bahwasannya di Desa Wisata ini berada di lereng gunung merapi dan warna hijau merujuk pada kesan peruntungan yang baik, kebijakan, kelembutan, kedamaian, juga cinta akan Desa. Warna biru memiliki kesan tenang dan dingin.
- c. Tulisan Desa Wisata Warna Coklat/Orange yang artinya merujuk pada kesan peruntungan yang baik, kebijakan, kelembutan, kedamaian, juga cinta akan Desa memiliki kesan tenang dan dingin.
- d. Tulisan Wisata Alam dan Budaya Tradisi berwarna Hijau artinya selalu dikaitkan dengan warna alam yang menyegarkan, membangkitkan energi dan juga mampu memberi efek menenangkan, menyejukkan, menyeimbangkan emosi dan elegan, menyembuhkan, menimbulkan perasaan empati terhadap orang lain untuk berwisata.
- e. Slogan Desa Tradisi (Tradisi: **T=tentram, A=aman, DI=dinamis, S=sehat, I=indah**). Desa tradisi dalam sebuah arti bahwa Desa ini sangat kuat akan ideologi tradisi akulturasi masyarakat yang bersifat religius yang telah terbentuk secara turun temurun seiring dengan perkembangan zaman sehingga disebut tradisi tidak melupakan nilai

budaya yang ada untuk selalu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat tradisional.

#### 4. Struktur Lembaga/Organisasi

Pengelolaan Desa Wisata Pulesari adalah sebuah proses dari sebuah kegiatan dalam organisasi atau lembaga yang memiliki struktur kepengurusan sampai pada divisi-divisi yang berbeda namun saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah susunan struktur pengurus Desa Wisata Pulesari:

**Tabel II.17**  
**Susunan Pengurus Desa Wisata Pulesari**

Status Jabatan	Penjabat>Nama
Pelindung	Lurah Wonokerto
Penasehat	Dukuh Becici
Ketua	Amin Sarjana
Wakil Ketua	Didik Irwanto
Sekretaris	Ahmad Latifudin dan M. Aqni Syafi'i
Bendahara	Prayitno dan Agus Siryanto
Seksi Kuliner	Riyanto dan Sarijo
Seksi Kerajinan	Ismanto
Seksi Pertanian dan Perikanan	Saekhan dan Anshori
Seksi Kebersihan	Edi Nuryanto, Suhardi, Mujiman, Mariyah dan Suyati
Seksi <i>Homestay</i>	Rhokim dan Sumardi
Seksi Pengembangan	Basri dan Amarudin
Seksi Keamanan	Wawan Riyanto, Sugeng
Seksi P3K	Sukri dan Kukuh Waluyo

*Sumber: data primer*

## **5. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

“Menciptakan sebuah wujud Desa Wisata Pulesari yang bersih, aman, nyaman, tentram, dinamis serta seni dan budaya religius yang berkualitas untuk menjadikan Desa Wisata Pulesari Edukasi masyarakat tradisional.”

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motivasi dan komitmen bersama membangun pola pikir yang rasional.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya tradisi masyarakat tradisional.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDA) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkualitas berkembang.
- 4) Mengutamakan kualitas Desa Wisata dibandingkan kuantitas.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun Desa Wisata yang bersih, aman dan nyaman.

## **6. Potensi Desa Wisata**

Desa Wisata Pulesari mempunyai daya Tarik yang sangat bagus sehingga banyak pengunjung yang datang meskipun keberadaan desa wisata pulesari yang berjarak sekitar 23 km dari kota Yogyakarta. Potensi wisata yang disuguhkan dari Desa Wisata Pulesari ini adalah Goa Sejarah, *Tracking* Sungai, Wisata Kebun Salak, Perikanan, Kerajinan, Kuliner, *Outbound* serta *Homestay* dan Pendopo sebagai penunjang saat berwisata. Fasilitas wisata lain yang mendukung kegiatan berwisata adalah Masjid, Mushola, Gardu Ronda,



Toilet Umum dan Gardu Gedek. Adapun objek Desa Wisata Pulesari dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar II.2 Goa Sejarah**



Goa sejarah yang kuno zaman dahulu digunakan untuk bersembunyi di zaman penjajahan Jepang oleh masyarakat Dusun Pulesari. Ada 6 Goa yang ada pada saat ini antara lain: Goa Dampar, Goa Cangkuk, Goa Leri, Goa Wayang, Goa Ular dan Goa Maling.

**Gambar II. 3 *Tracking* Sungai**



*Tracking* sungai adalah salah satu kegiatan berwisata yang disajikan untuk pengunjung wisata. Dengan menikmati indahnya alam pedesaan yang ada disekitarnya dengan *tracking* sungai melewati aliran sungai yang sangat menarik sehingga dapat menikmati gemericik air yang mengalir yang berhulu dari gunung merapi sehingga menjadikan suasana atraktif tersendiri bagi pengunjung wisata Pulesari. Ada juga wahana yang disediakan pada *tracking*

sungai seperti: Jembatan Goyang, Titihan Bambu, Vertikal *Web*, Gubug Hujan, Tangga Air, Susup Ban, *Spider Web*, Jaring Laba-laba dan Air Terjun.

#### **Gambar II.4 Wisata Kebun Salak**



Wisata kebun salak atau disebut wisata agrobisnis adalah objek wisata yang disuguhkan kepada wisatawan yang datang dan memetik salak sendiri dan makan salak di dalam kebun salak sepuasnya. Namun ketika membawa buah salak keluar dari kebun tersebut harus membeli salak yang dibawa. Wisata kebun salak ini harapannya wisatawan tahu akan tentang budidaya salak pondoh dan cara merawat kebun sesuai SOP budidaya salak dan wisatawan dapat menikmati makanan khas kuliner desa wisata dengan melakukan pesta kebun di dalam kebun salak.

#### **Gambar II.5 Perikanan**



Objek wisata perikanan disuguhkan kepada wisatawan untuk menikmati kegiatan memancing. Pengelola wisata hanya menyewakan

pancing dan pakan serta untuk hasil pancingannya akan dihitung sendiri sesuai hasil pancingan ikan yang telah didapat dengan perhitungan per-Kg sesuai harga pasaran pada umumnya. Selain itu ada juga kegiatan menangkap ikan, tujuannya adalah untuk menghibur dalam keahlian menangkap ikan didalam kolam-kolam.

### Gambar II.6 Seni dan Budaya



Ket: Kesenian Kubro Siswo



Ket: Kesenian Tari Salak



Ket: Prajurit/Bregodo



Ket: Upacara Adat Pager Bumi

- a. Kesenian Kubro Siswo adalah kesenian bernuansa religi yang dikolaborasi dengan gamelan dan musik-musik Islami sehingga bisa menjadi sebuah sajian Tarian Budaya Religi.
- b. Tarian salak diwujudkan masyarakat dari sebuah potensi salak pondoh yang ada di Dusun Pulesari sehingga dikembangkan menjadi sebuah tarian salak pondoh.
- c. Bregodo/prajurit merupakan gerakan barisan yang dilatih secara khusus yang pada zaman dahulu dimiliki oleh kerajaan-kerajaan untuk mengiringi

raja atau permaisuri ketika bepergian. Saat ini telah dikembangkan oleh masyarakat Dusun Pulesari untuk mengiringi kegiatan upacara adat dan kegiatan budaya.

**Gambar II.7 Kerajinan**



Kerajinan yang ada di Desa Wisata Pulesari ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis kerajinan yang beraneka ragam yang perlu dilestarikan untuk menambah pengetahuan dan penghasilan. Adapun jenis-jenis kerajinan yang berada di Desa Wisata Pulesari yaitu: kerajinan pembuatan tenggok, kerajinan pembuatan kepang, kerajinan pembuatan pandai besi dan kerajinan pertukangan kayu.

**Gambar II.8 Kuliner**



Wisatawan dapat menikmati makanan khas kuliner Desa Wisata dengan berbagai macam menu pilihan yang tersedia serta dapat belajar olahan masakan desa yang sederhana. Adapun makanan khas desa wisata seperti:

Sego Megono, Pepes Nila dan Sego Pecel serta ada juga minuman khas desa wisata yaitu: Jaeser, Kolak Salak dan Wedang Jaburan.

*Outbound* merupakan area permainan yang bersifat memberikan edukasi tentang kekompakan dalam sebuah team dalam melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat dua jenis *outbound* yaitu, *outbound training* terdiri dari, Jaringan Rintangan Air, Tangga Tebing Goyang, Merangkak Ban Diatas Air, Gubug Hujan dan Lompatan Ban diatas Air. Kemudian ada juga kegiatan *outbond* yang terdiri dari, Menangkap Ikan, Mengisi Air Bumbung, Sandal Bakiak.

**Gambar II.9 Homestay**



*Homestay* sebagai penunjang bagi wisatawan untuk menginap saat melakukan kegiatan berwisata. Bangunan *homestay* terdiri dari rumah-rumah penduduk desa sekitar lokasi desa wisata yang harapannya ada interaksi secara langsung dari masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui kegiatan sehari-hari masyarakat pedesaan. Fasilitas yang disediakan dalam *homestay* adalah, Rumah sederhana ala pedesaan, ruang tidur, tempat tidur kasur, selimut, bantal, dan kamar mandi/toilet.

## 7. Proses Berwisata

Desa Wisata Pulesari menawarkan berbagai kegiatan wisata dengan konsep wisata alam dan budaya tradisi. Daya tarik Desa Wisata Pulesari dimanjakan dengan pemandangan gunung merapi membuat wisata tersebut memiliki suasana alam yang khas Desa. Selain wisata alam dan budaya tradisi, keistimewaan Desa Wisata Pulesari dibandingkan desa wisata lainnya adalah adanya tanaman salak yang menjadi bagian objek wisata yang ditawarkan. Untuk menikmati aktivitas di Desa Wisata Pulesari, wisatawan dapat memesan paket wisata yang sudah ditentukan oleh pengelola Desa Wisata Pulesari. Berikut paket wisata yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

**Gambar II.10 Paket Wisata 1 hari**



Paket wisata 1 hari terdiri dari paket tradisi 1, paker tradisi 2, paket tradisi 3 dan paket tradisi 4 dengan kapasitas minimal 20 sampai 25 orang dan dengan biaya yang mulai dibandrol dari harga Rp. 55.000, sampai harga Rp. 105.000. Paket wisata 1 hari yang terbagi dari 4 paket tradisi juga mempunyai fasilitas yang berbeda-beda sesuai yang dipesan oleh wisatawan.

**Gambar II.11 Paket Makrab 2D 1 N**



Berbeda dari paket wisata 1, paket wisata makrab dilakukan 2 hari 1 malam, dimana wisatawan akan bermalam di *homestay* dan juga dukungan fasilitas yang lainnya. Kapasitas wisatawan minimal 20 orang dengan harga untuk Malam Keakraban sebesar Rp. 145.000 dan *Gathering Live In* sebesar Rp. 185.000.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan berkaitan dengan “Sinergi Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata” sebagai berikut:

1. Sinergi Pemerintah Kalurahan Wonokerto pada proses awal pembangunan Desa Wisata Pulesari belum terlihat. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa mampu mengembangkan potensi yang disekitar lingkungan mereka. Selain itu, Kalurahan Wonokerto tidak mempunyai Aset Desa yang berada di Pulesari sehingga keterlibatan Pemerintah Kalurahan untuk bersinergi membangun Desa Wisata Pulesari bersama masyarakat dirasa tidak diperlukan. Ini menunjukkan sikap eksklusif yang diberikan masyarakat yang menganggap bahwa Pemerintah Kalurahan Wonokerto tidak mempunyai kewenangan untuk bersinergi membangun Desa Wisata Pulesari.
2. Dalam perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan untuk pembangunan Desa Wisata Pulesari bisa dilihat dari legalitas yang diterima oleh pengelola Desa Wisata Pulesari dari peran Pemerintah Kaluraha Wonokerto sampai pada Pemerintah supra Kalurahan. Peran Pemerintah Kalurahan hanya sekedar mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dan masyarakat di Desa Wisata Pulesari. Kemudian peran Pokdarwis Kalurahan Wonokerto juga mendukung



segala kebutuhan dari desa wisata ketika masyarakat dan pengelola wisata membutuhkan bantuan.

3. Sejak diresmikan menjadi Desa Wisata Pulesari oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman maka pengelolaan Desa Wisata Pulesari telah berjalan secara mandiri tanpa ada keterlibatan dari Pemerintah Kalurahan dan pihak Swasta yang dianggap bahwa masyarakat mampu mengelola dengan semangat gotong royong dan secara swadaya mengembang Desa Wisata Pulesari. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengelola dan masyarakat telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan pihak swasta. Sinergi dengan Pemerintah yang dijalankan adalah memberikan segala bentuk bantuan yang dapat mengembangkan Desa Wisata Pulesari. Kerja dengan pihak swasta adalah sekedar memberikan beberapa aset *homestay* untuk disewakan dalam penggunaan aplikasi penginapan *online*. Jadi, sinergi kedua lembaga tersebut hanya sekedar memberikan stimulus untuk pengembangan Desa Wisata Pulesari.
4. Penerimaan pembangunan Desa Wisata Pulesari dari masyarakat tentunya mendapatkan berbagai penolakan karena kapabilitas masyarakat serta harus beradaptasi dengan hadirnya pariwisata. Namun pembangunan Desa Wisata pada akhirnya diterima dengan semangat gotong royong dengan modal sosial karena pembangunan Desa Wisata Pulesari ini adalah basisnya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Pulesari. Selain itu kapasitas pengelola wisata juga menjadi kendala sehingga tahap demi peningkatan kapasitas pengelola mulai dari pemandu, kuliner,

keamanan, pengembangan obyek wisata mulai dibenahi. Perkenalan daya tarik melalui media sosial juga digunakan oleh pengelola wisata yang bertujuan untuk memperkenalkan Desa Wisata Pulesari kepada khalayak umum.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari harus ada sinergi dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari. Masyarakat harus bisa melibatkan Pemerintah Kalurahan yang berperan sebagai pembuat regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan.
2. Membangun sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat untuk melihat potensi sumber daya alam perlu dilakukan secara bersama-sama. Hal itu bertujuan agar potensi tersebut dapat menjadi unggulan yang dapat dikemas dalam pengelolaan Desa Wisata dan yang paling utama adalah komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat.
3. Komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat tidak sekedar berupa materiil guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Namun harus juga meningkatkan kreativitas, masyarakat dalam mengelola Desa Wisata Pulesari untuk diimplementasikan dengan keadaan yang sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Argyo, Demartoto. 2009. *Pembangunan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. UNS Press. Surakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Cetakan Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bogdan. Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, EKonomi, Kebijakan, Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Putra Grafika. Jakarta.
- Deddy, Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Dwipayana, A., Rozaki, A., Sujito, A., Hidayana, Bambang., Purnomo, Joko., Hermawanti, M., Kurniawan, I. N., Anggraini, C. N., Zamroni, S., dan Eko, Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Institute for Research and Empowerment. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2015. "Regulasi Baru, Desa Baru, Ide Misi, dan Semangat UU Desa". Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Edisi Keempat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kaunang, P. H. 2019. *Buku Desa Kuat Negara Berdaulat*. Cetakan I. The Indonesian Power for Democracy. Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Kooiman Jan, ed. 1993. *Modern Governance: New Government–Society Interactions*. London: Sage.
- Komariah, A., Satori, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Refika Aditama. Bandung.
- Sofyandi, Herman., Garniwa, Iwa. 2007. *Perilaku Organisasi*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Jakarta.
- Soleman, B. Taneko. 1984. *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Rajawali. Jakarta.
- Uphoff N. 1986. *Local Institutional Development*. West Hartford. CT. Kumarian Press.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. ANDI. Yogyakarta.

**Jurnal:**

- Andriyani, I. A. A. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 23 (1): 1-16.
- Atmoko, T. P. H. 2014. Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata*. 12 (2): 146-154.
- Eko, Sutoro. 2021. Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*. 2 (1): 1-17
- Fitari, Y., Ma'arif. 2017. Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. 5 (1): 29-94.
- Herdiana, Dian. 2019. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata*. 6 (1): 63-86.
- Hermawan, H. 2016. Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*. 3 (2): 105-117.
- Khomzi, R. I., Handono, Y. S., Trianawati, A. 2019. Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. *Journal Agribusiness*. 13 (2): 25-35.

- Kirana, D. A. C., Artisa, A. Rike. 2020. Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*. 6 (1): 68-84.
- Nurchayono, H. O. 2017. Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan. *Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*. 4 (1): 42-60.
- Priasukmana, S., Mulyadin, M. R. 2001. Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan UU Otonomi Daerah. *Jurnal Info Sosial Ekonomi*. 2 (1): 37-44.
- Puspitasari, C., Sumarjono., Mardhika, G. J., Perdana, P. 2022. Pola Relasi Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*. 3 (1): 17-34.
- Putra, R. T. 2013. Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 9 (3): 225-235.
- Rahmawati, Triana et al. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2 (4): 641-647.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. *Jurnal Binamulia Hukum*. 7 (1): 82-95.
- Sundari. Suryasih, A. I. 2018. Sinergi Pengelolaan Wilayah Desa Wisata Serang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Destinasi Pariwisata*. 5 (2): 248-253.
- Sukardi. 2014. Good Governance: Reposisi Administrasi Publik, Lensa Kapital Sosial. *PUBLISA: Jurnal Administrasi Publik*. 18 (1): 21-43.
- Suleman, Sukur., Kahumata, Christina. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata (Studi pada Desa Gamtala, Kabupaten Halmahera Barat). *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom*. 2 (1): 59-65.
- Syaifudin, Y. M., Ma'ruf, F. M. 2022. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata. (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Publika*. 10 (2): 17-30.
- Tjahjono, S. W., Murdiyanto, Eko., Widayanto. B. 2021. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Di Kawasan Hutan Lindung. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*. 22 (1): 103-113.
- Trisnawati, E. A., Wahyono, Hari., Wardoyo, C. 2018. Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*. 3 (1): 29-33.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 2009 Tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

**Skripsi/Tesis/Disertasi:**

Sitepu, I. R. Putri. 2022. *Relasi Pemerintah Desa Dan Kelompok Sadar Wisata Dalam Mengelola Desa Wisata Di Kalurahan Tirtodadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD”. Yogyakarta.

**Artikel Seminar/Simposium:**

Zaenuri, Muchamad. 2016. *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance*. 7 November. 1-71.

# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

### “SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM INOVASI PEMBANGUNAN DESA WISATA”

#### A. Identitas Informan

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :

#### B. Daftar Pertanyaan

1. Jaringan (*networking*) antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa wisata.
  - a. Bagaimana bentuk pengelolaan desa wisata yang ada wisata Pulesari?
  - b. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - c. Kapan proses pembangunan desa wisata Pulesari dilakukan?
  - d. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat Pulesari dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - e. Bagaimana bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - f. Apakah ada penyertaan modal dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - g. Apakah desa wisata Pulesari tergabung dalam unit BUMDesa?
  - h. Berapa jumlah destinasi wisata yang berada di desa wisata Pulesari?
  - i. Apa saja jenis sumber daya yang disediakan selain dari sumber daya alam?
  - j. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang disediakan di desa wisata Pulesari?
2. Keberagaman aktor dalam perumusan kebijakan maupun implementasi pembangunan desa wisata.
  - a. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan desa wisata Pulesari?



- b. Apakah Kalurahan Wonokerto mempunyai peraturan desa yang mengatur tentang desa wisata?
  - c. Bagaimana bentuk respon dari pemerintah Kalurahan dengan hadirnya desa wisata Pulesari?
  - d. Apakah dalam perumusan kebijakan pembangunan sudah melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta?
  - e. Berapa jumlah pendapatan yang diterima dari desa wisata Pulesari?
  - f. Bagaimana dengan pembagian dari hasil pendapatan desa wisata Pulesari?
  - g. Kapan wisata Pulesari mendapatkan legitimasi dari pemerintah dan masyarakat Kalurahan Wonokerto?
  - h. Bagaimana dengan status kepemilikan tanah di Pulesari?
  - i. Apakah pembangunan desa wisata yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pulesari?
  - j. Kapan masyarakat berkumpul untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan pembangunan desa wisata Pulesari?
3. Hubungan horizontal dan vertikal antara pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan desa wisata.
- a. Bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah Kalurahan dalam proses pembangunan desa wisata Pulesari?
  - b. Apakah pemerintah daerah ikut dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - c. Apakah Lembaga-lembaga desa maupun swasta terlibat dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - d. Apakah pengelola desa wisata Pulesari mempunyai legitimasi dari pemerintah?
  - e. Apakah desa wisata Pulesari sudah termasuk dalam RPJMDesa Wonokerto?
  - f. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan desa wisata Pulesari?
  - g. Apakah pemerintah Kalurahan Wonokerto membentuk organisasi-organisasi dalam kelompok masyarakat?

- h. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - i. Apakah masyarakat Pulesari terlibat langsung dalam pengelolaan desa wisata Pulesari?
  - j. Bagaimana bentuk modal sosial yang diberikan oleh masyarakat dalam pengembangan desa wisata Pulesari?
4. Akseptabel (*Acceptable*) antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan penerimaan pembangunan desa wisata.
- a. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa wisata Pulesari?
  - b. Apakah ada pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai pembangunan desa wisata Pulesari?
  - c. Bagaimana bentuk pengelolaan sumber daya alam di kawasan desa wisata Pulesari?
  - d. Bagaimana perubahan yang dialami sebelum dan sesudah adanya desa wisata Pulesari?
  - e. Apa saja perubahan-perubahan yang sudah dirasakan setelah adanya desa wisata Pulesari?
  - f. Mengapa Pulesari menjadi tujuan dalam pembangunan desa wisata?
  - g. Apakah masyarakat ikut serta dalam mengawasi pembangunan desa wisata yang dilaksanakan di Pulesari?
  - h. Apakah ada program peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola desa wisata Pulesari?
  - i. Apakah ada upaya untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan desa wisata Pulesari?
  - j. Bagaimana kemampuan pemerintah Wonokerto dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakatnya?

## DOKUMENTASI INFORMAN





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT, No.25/USK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat: J. Tondiro No. 311 Yogyakarta 55226. Telp. (0274) 501971, 550775. Fax. (0274) 515888 – Yogyakarta 55226

Nomor : 169/PEM/J/X/2021

Hal : Pemunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Yth Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Taufik Hidayah Idris  
No. Mahasiswa : 17520188  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Pengajuan Judul : 11 Oktober 2021  
Judul Proposal : Reinventing Government = Kewirausahaan Government

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Oktober 2021

Ketua Program Studi

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 551871, 550775, Fax. (0274) 519989 website: www.apmd.ac.id e-mail: info@apmd.ac.id

Nomor : 809/1U/2022  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Lurah Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 22 Desember 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Taufik Hidayah Idris  
No Mhs : 17520188  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata  
(Studi Penelitian Kualitatif di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, DIY)  
Tempat : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Desember 2022  
Ketua  
  
Dr. Saroro Eko Yunanto  
NID. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN, WILAYAH KOTA, STATUS TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN, WILAYAH KOTA, STATUS TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA PEMERINTAHAN, WILAYAH KOTA, STATUS TERAKREDITASI

Alamat : Jl. Timoho No. 217 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 590775, Fax. (0274) 515989 website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 483/IT/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Taufik Hidayah Idris  
Nomor Mahasiswa : 17520188  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
b. Sasaran : Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata (Studi Penelitian Kualitatif di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, DIY)  
c. Waktu : 22 Desember 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

22 Desember 2022  
Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yumanto  
NID. 170 230 190

**PERHATIAN :**  
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**  
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KAPANEWON TURI  
PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO

*Desa Hidayah*  
Imorejo, Wonokerto, Turi, Sleman, 55551  
Telepon (0274) 7495721 Laman: sidewa.id, Surel: ds.wonokerto@gmail.com

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
**NO: 01/WNK/I/2023**

**LURAH WONOKERTO**

Dasar : 1. Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian , Izin Kuliah Kerja Nyata Dan Izin Praktik Lapangan  
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor : 809/I/I/2022

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **TAUFIK HIDAYAH IDRIS**  
Universitas : **STPMD "APMD"**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
No Mhs : **17520188**  
Judul Penelitian : **Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata ( Studi Penelitian Kualitatif di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, DIY)**  
Lokasi : **Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta**  
Dosen Pembimbing : **Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si**  
Waktu : **22 Desember 2022 – 22 Februari 2023 (2 bulan)**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melapor diri kepada pemerintah setempat ( Lurah ) atau kepala instansi untuk dapat mendapatkan petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan hasil laporan hasil penelitian sebanyak 1 ( satu ) eksemplar atau CD kepada Lurah Wonokerto.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 ( satu ) bulan berakhirnya penelitian ini.

Dikeluarkan di : Wonokerto  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023  
Lurah Wonokerto  
  
**RIYANTO SULISTYO BUDI, S.E.**



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/TV/2015)

Alamat: Jl. Teroto No. 317, Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 961971, 490775. Fax. (0274) 933889 - Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Taufik Hidayah Idris  
Nomor Mahasiswa : 17520188  
Judul : SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT  
DALAM INOVASI PEMBANGUNAN DESA WISATA  
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si  
Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
14-10-2021	<p>Memberitahukan mengenai penunjukan dosen pembimbing dan konduksi penelitian judul penelitian. kemudian berikan prosep penelitian dan proposal penelitian permasalahan apa yang akan diteliti? Siapa objek penelitiannya? Lokasi penelitian dimana?</p>	
03-01-2022	<p>Latar belakang masalah ditambahkan permasalahan yg terjadi di lokasi penelitian sesuai dgn judul penelitian. kemudian ditulis pada awal paragraf latar belakang masalah sebagai gambaran krusial. Tambahkan juga tentang kajian pustaka Tambahkan mazhab Timoko sebagai salah satu perspektif dari 55 galam penelitian.</p>	
24-11-2022	<p>Latar belakang masalah ditambahkan konsep Governance sebagai konsep politik pemerintahan Desa dan masyarakat mengaitkan sinergi pemerintah dgn konsep Governabilitas untuk melihat kapasitas pemerintah dan politik, administrasi dan hukum. Tinjauan pustaka : tambahkan kobhar way novelty sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian untuk menemukan</p>	



	<p>terbaru dalam penelitian.</p> <p>Rumusan masalah: ditulis sesuai konsep Governance, bukan judul penelitian yg ditulis kembali.</p> <p>Kajian pustaka: tambahkan terkait genealogi Governance selain dari jurnal Governabilitas.</p> <p>Konsep masyarakat: tambahkan konsep masyarakat sebagai Privasi dan kelompok</p> <p>Ruang lingkup penelitian: menambahkan konsep Governance sebagai Variabel dalam ruang lingkup penelitian.</p>	
25-12-2022	<p>Rumusan masalah: tambahkan pertanyaan sehingga ada hal yg akan ditanyakan dalam bentuk informasi.</p> <p>Ruang lingkup penelitian: Governance dilihat dari teori/konsep yg digunakan dan penelitian.</p> <p>Ruang lingkup penelitian: Pemb. Dosa Wisata sebagai Variabel dibelakang kot. diperlebar kesimpulannya dan kajian pustaka ditambahi data empirik.</p>	hj
12-12-2022	<p>menambah pertanyaan wawancara.</p> <p>menambah Daftar pustaka.</p> <p>Acc proposal</p>	hj
14-12-2022	<p>memperbaiki format penulisan.</p> <p>menambahkan Daftar isi dan membuat nomor halaman pada proposal penelitian.</p>	hj

Mengetahui / Menyetujui  
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Ijei Samalisa, S.Sos, M.Si

Dr. Safitri Endah Winarti, M.Si



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat: Jl. Teroles No. 317, Yogyakarta 55225, Telp. (0271) 581871, 582775, Fax. (0271) 515889 - Yogyakarta 55225

### KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Taufik Hilayah Kris  
Nomor Mahasiswa : 17520188  
Judul : SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT  
DALAM ~~INOVASI~~ INOVASI PEMBANGUNAN  
DESA WISATA.  
Dosen Pembimbing : Dra. Sofitri Endah Winarti, M.Si  
Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
07-06-2023	1. Melengkapi Intisari 2. Menambahkan nomor halaman	Ky
<del>04-06-2023</del> 12-06-2023	1. Penambahan Intisari Skripsi 2. Menambah BAB VI. Kesimpulan dan Saran 3. Melengkapi halaman cover, halaman judul, kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel, halaman persembahkan, dll	Ky
16-06-2023	- Memperbaiki nama dosen beserta gelar yg masih kurang dan typo. - Pada BAB II, belan ada tabel yg belum dikasih judul dan nomor tabel. - Pemeriksaan kembali Daftar isi dan Daftar tabel jika ada perubahan. - Perbaiki intisari skripsi pada bagian lineas satu yang memuat ringkasan dari <del>latar</del> latar belakang masalah sampai rumusan masalah. - Harusnya line intisari skripsi <del>di</del> <u>di</u> <del>awal</del> <u>awal</u> <del>linea</del> <u>linea</u> pertama menunjukkan adanya masalah / problem sehing peneliti tertarik untuk mendefinisikan	Ky

19-06-2023	<del>ACC Skripsi</del>	
17-06-2023	Koreksi : memperbaiki pendobelan & nomor halaman pada skripsi. kemudian skripsi dibuat dan bentuk file pdf lalu di print untuk diserahkan pada hari Senin, 13-06-2023, di kampus ruang kerja PMB.	L
19-06-2023	ACC Skripsi	Kj

Mengetahui / Menyetujui  
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dr. R. Jeli Samalisa, S.Sos, M.Gi

Dosen Pembimbing :

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si



**Lumbung Desa STPMD "APMD"**  
Perpustakaan Setingkat Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
S. Tiroda 117 Gondokanman Yogyakarta 55225  
Email: perpustakaan@apmd.com telp/WA: 0821-7628-2177

## TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: TAUFIK HIDAYAH IDRIS  
Judul makalah: SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM  
INOVASI PEMBANGUNAN DESA WISATA  
Tanggal pemeriksaan: 19 Juni 2023  
Persentase plagiasi: 19%



Petugas: Checked By:

Rendi Yogi Kusbiantara

